



PEMERINTAH KABUPATEN
TANAH LAUT



(RENJA) **RENCANA KERJA** **PERUBAHAN** **TAHUN 2025**

**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH**



S A L I N A N

BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 100.3.3.2/ 824 -KUM/2025

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2025

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah selaras dengan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah perlu penetapan Keputusan Bupati untuk menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 62);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 13);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 60);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 2025 –

2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 12);

22. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 39 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 39);
23. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 34 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 34);
24. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 69 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 69);
25. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 32 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 34 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Keputusan Bupati tentang Penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memuat:
- a. pendahuluan;
 - b. evaluasi renja sampai dengan triwulan I tahun berkenaan;
 - c. rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah; dan
 - d. penutup.
- KETIGA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 sebagai pedoman penyusunan Perubahan Kebijakan Umum

Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara
(Perubahan KUA dan PPAS) Tahun 2025.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Pelayhari
pada tanggal 30 Juni 2025

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. RAHMAT TRIANTO

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL, SH, MH
NIP.19750203 199903 2 008

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT



RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Alamat: Jl. A.Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari 70814

☎ Telepon : 0512-2425788 ✉ e-mail : sekretariat@bpkad.tanahlautkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET

DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT

NOMOR : 100.3.5.4/10/BPKAD/ 2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2025

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja (Renja) SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024;
 - b. bahwa untuk melegalkan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 maka perlu mempunyai dasar hukum yang sah ;
 - c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan dimaksud huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021

tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tamabahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 33);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 10);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

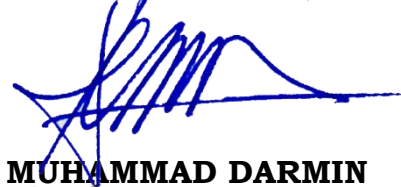
19. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 34 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
Pertama : Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025.
- Kedua : Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut sebagaimana dimaksud Diktum Pertama tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut sebagaimana dimaksud Diktum Kedua merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut dan dipergunakan sebagai acuan bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut dalam melakukan evaluasi capaian kinerja SKPD.
- Keempat : Agar seluruh personil di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut mempedomaninya serta melaksanakan dengan segala kesungguhan dan penuh rasa tanggungjawab.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelayhari
Pada tanggal 10 Juni 2025

KEPALA BADAN,



MUHAMMAD DARMIN

Tembusan :

1. Bupati Tanah Laut (sebagai laporan)
2. Wakil Bupati Tanah Laut (sebagai laporan)
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut
4. Kepala Bappeda Kabupaten Tanah Laut.

KATA PENGANTAR

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut, dan demi kesinambungan pelaksanaan RPJMD, Renstra SKPD khususnya untuk tahun ke satu, maka disusunlah Renja Perubahan SKPD untuk Tahun Anggaran 2025 yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari RPJMD dan Renstra SKPD yang telah ditetapkan.

Disusunnya Renja Perubahan SKPD adalah dalam rangka penyusunan RKPD Perubahan untuk Tahun Anggaran 2025 yang selanjutnya setelah melalui proses sesuai ketentuan, akan dituangkan dalam KUA/PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2025 yang merupakan dasar dalam penyusunan RKA Perubahan -SKPD. Dimana RKA Perubahan -SKPD setelah melalui pembahasan oleh TAPD akan diformulasikan ke dalam RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2025.

Oleh karena itu penyusunan Renja Perubahan SKPD sangatlah penting artinya dalam suatu proses perencanaan dalam rangka pencapaian visi misi, baik untuk RPJMD maupun visi dan misi Renstra SKPD itu sendiri.

Dalam dokumen perencanaan Renja Perubahan SKPD tidak saja memuat Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan Perubahan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran, namun juga memuat tentang evaluasi atas pelaksanaan Program dan Kegiatan tahun sebelumnya yang telah dilaksanakan. Dengan demikian diharapkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dapat dipecahkan dan dicarikan solusinya, sehingga sasaran dalam Renstra SKPD yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan optimal.

Pelaihari, 10 Juni 2025

Kepala BPKAD Kab. Tanah Laut



MUHAMMAD DARMIN, S.IP, M.Si

(Pembina Utama Muda / IV.c)

NIP. 19661227 198703 1 002

DAFTAR ISI

Halaman Judul	
Kata Pengantar	
Daftar Isi	
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	2
C. Maksud dan Tujuan	5
D. Sistematika Penulisan	6
 BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025	 7
A. Evaluasi Pelaksanaan RKPD TA 2025.	7
B. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD BPKAD	34
C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD.	38
D. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan.	47
 BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	 48
A. Tujuan	48
B. Sasaran	49
 BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	 51
A. Program	51
B. Kegiatan	52
C. Sub Kegiatan	53
 BAB V : PENUTUP	 87



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Alamat: Jl. A.Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari 70814

☎ Telepon : 0512-2425788 ✉ e-mail : sekretariat@bpkad.tanahlautkab.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2025

BPKAD KABUPATEN TANAH LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **MUHAMMAD DARMIN, S.IP, M.Si**

Jabatan : **Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Tanah Laut**

Menyatakan akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja dalam dokumen Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Kami akan melakukan evaluasi terhadap rencana kerja dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 10 Juni 2025

**KEPALA BPKAD
KABUPATEN TANAH LAUT**



MUHAMMAD DARMIN, S.IP, M.Si
(Pembina Utama Muda / IV.c)
NIP. 19661227 198703 1 002

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai tindak lanjut amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, maka Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD). Renja SKPD merupakan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran dalam rangka menjamin penyelenggaraan pemerintah yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif di bidang perencanaan pembangunan daerah. Renja Perubahan SKPD disusun dengan mengacu pada RKPD Perubahan, Renstra-SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang akan dilaksanakan. Program dan kegiatan Perubahan yang akan diusulkan tentunya harus selaras dengan RPJMD dan Renstra SKPD, agar tujuan yang telah ditentukan dapat dicapai sesuai tahapan waktunya.

Penyelarasan ini penting karena berkaitan dengan kesinambungan suatu perencanaan yang telah ditetapkan, dimana Renja Perubahan SKPD adalah merupakan penjabaran lebih lanjut dari Renstra SKPD dan RPJMD yang dilakukan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan baik dalam Renstra SKPD maupun dalam RPJMD.

Penyusunan Renja SKPD tentunya nanti akan diteruskan dalam penyusunan RKPD Perubahan, yang selanjutnya akan dituangkan lagi ke dalam KUA/PPAS Perubahan sebagai dasar nantinya penyusunan RKA Perubahan SKPD. Selanjutnya setelah RKA Perubahan SKPD dibahas dan dihimpun

menjadi dokumen APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025, hasil akhir dokumen perencanaan tahunan adalah ditetapkan DPA Perubahan SKPD TA 2025 sebagai dasar pelaksanaan anggaran dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan.

B. Landasan Hukum

Penyusunan Renja Perubahan SKPD BPKAD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 dilandasi oleh :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tamabahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

- Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah;
 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut nomor 8 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 2025 – 2045;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 13);
 18. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut;

19. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 34 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan disusunnya Renja Perubahan SKPD BPKAD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 adalah untuk memberikan arah yang jelas berupa Program dan Kegiatan dengan target kinerjanya yang akan dilaksanakan dalam satu Tahun Anggaran, yaitu tahun anggaran 2025. Berdasarkan Renja Perubahan SKPD BPKAD inilah maka nantinya akan diformulasikan dalam APBD Perubahan Kabupaten Tanah Laut melalui mekanisme yang berlaku.

Maksud disusunnya Perubahan Renja SKPD BPKAD Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025, antara lain untuk :

- a. Meningkatkan konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaannya ;
- b. Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan program ;
- c. Menyelaraskan program dengan penganggaran ;
- d. Meningkatkan akuntabilitas pemanfaatan sumber daya dan keuangan ;
- e. Terwujudnya penilaian kerja yang terukur dan perencanaan yang pelaksanaan sesuai dengan Renstra SKPD.

Sedangkan tujuannya adalah :

- a. Menjabarkan Rencana Strategis kedalam program dan kegiatan untuk 1 (satu) tahun anggaran ;
- b. Menjadikan pedoman dalam pelaksanaan Program/Kegiatan BPKAD Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025
- c. Sebagai upaya mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan anggaran dan program kegiatan yang ada pada BPKAD Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025

Dengan demikian maksud dan tujuan disusunnya Perubahan Renja SKPD BPKAD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 adalah untuk memberikan arah

yang jelas berupa program dan kegiatan dengan target kinerjanya yang akan dilaksanakan dalam satu Tahun Anggaran, yaitu tahun anggaran 2025.

D. Sistematika Penulisan

Renja Perubahan SKPD BPKAD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 disajikan dalam bentuk sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat/menjelaskan maksud, tujuan, dan dasar pertimbangan perubahan yang disertai dengan gambaran tentang perubahan kerangka ekonomi daerah.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN I TAHUN 2025

Memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I Tahun 2025.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Memuat tujuan dan sasaran strategis SKPD sesuai dengan yang tercantum pada Renstra SKPD sehingga terdapat keselarasan.

BAB IV RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA SKPD

Memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan.

BAB V PENUTUP

Memuat tentang hal-hal yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN I TAHUN 2025

A. Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2025

Evaluasi atas pelaksanaan RKPD tahun 2025 yang telah menjadi Belanja Langsung dalam APBD TA 2025 yang terdiri dari 3 Program 12 Kegiatan dan 58 Sub Kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Alokasi dan Realisasi Anggaran Kabupaten Tanah Laut
Triwulan I Tahun Anggaran 2025

No.Kode	PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Output dalam DPA	Target Kinerja	Anggaran DPA Murni (Rp)	Anggaran DPA Pergeseran Efisiensi (Rp)	Realisasi				Sisa Pagu Anggaran	Ket Kendala/M asalah
						Fisik		Keuangan			
						Kinerja	%	Rp	%	Rp	
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			11.759.339.108,00	11.169.422.719,00		27,31%	2.285.438.683,00	20,46	8.883.984.036,00	

5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi (Dokumen)	13 dokumen	13.991.158,00	13.927.904,00	dokumen, Laporan	60,00%	0,00	-	13.927.904,00	
5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6 dokumen	8.993.175,00	8.930.693,00	dokumen	60,00%	0,00	-	8.930.693,00	
5.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	6 laporan	4.997.983,00	4.997.211,00	3 Laporan	60,00%	0,00	-	4.997.211,00	
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu*) (%)	350 dok, 45 org/12 bln	8.827.656.332,00	8.826.256.332,00	Bulan, Dokumen	30,01%	1.962.496.311,00	22,23	6.863.760.021,00	
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji, Tunjangan, Jaminan Kesehatan ASN*) (bulan)	45 Org/12 bulan	8.820.656.465,00	8.820.656.465,00	45 . 2 orang bulan	30,00%	1.960.360.811,00	22,22	6.860.295.654,00	
5.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan Keuangan SKPD yang tersusun*) (dokumen)	350 dokumen	6.999.867,00	5.599.867,00	80 dokumen	40,00%	2.135.500,00	38,13	3.464.367,00	
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*) (%)	3 paket	47.462.500,00	5.000.000,00	- Paket Orang	0,00%	0,00		5.000.000,00	
5.02.01.2.05.02	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Pengadaan paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	1 paket	37.462.500,00	0,00	paket		0,00	-	-	

5.02.01.2.05. 011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (orang)	2 Orang	10.000.000,00	5.000.000,00	Orang		0,00	-	5.000.000,00	
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah*) (%)	3 dok,14 paket, 200 laporan	1.339.497.602,00	793.506.967,00	Paket, Lap, Dokumen	22,38%	147.997.235,00	18,65	645.509.732,00	
5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan*) (unit)	1 paket	9.984.679,00	9.984.679,00	paket		0,00	-	9.984.679,00	
5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan*)	8 paket	130.499.274,00	112.405.496,00	4 paket	50,00%	61.993.000,00	55,15	50.412.496,00	
5.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 paket	9.992.657,00	9.992.657,00	paket	60,00%	4.757.000,00	47,60	5.235.657,00	
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang di sediakan	2 paket	49.999.792,00	39.977.935,00	2 paket	20,00%	3.908.800,00	9,78	36.069.135,00	
5.02.01.2.06.07	Jumlah Penyediaan Bahan / Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 paket	15.000.000,00	12.000.000,00	Bahan	30,00%	0,00	-	12.000.000,00	
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 laporan	1.070.250.000,00	555.375.000,00	77 laporan	20,00%	77.338.435,00	13,93	478.036.565,00	
5.02.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	28.771.200,00	28.771.200,00	Dokumen		0,00	-	28.771.200,00	
5.02.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	Dokumen		0,00	-	25.000.000,00	

5.02.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		24 unit	546.275.900,00	546.275.900,00	- Unit	0,00%	0,00	-	546.275.900,00	
5.02.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	Unit		0,00	-	50.000.000,00	
5.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	14 Unit	99.922.200,00	99.922.200,00	Unit		0,00	-	99.922.200,00	
5.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	146.353.700,00	146.353.700,00	Unit		0,00	-	146.353.700,00	
5.02.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	250.000.000,00	250.000.000,00	Unit		0,00	-	250.000.000,00	
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah	15 laporan	849.921.716,00	849.921.716,00	4 Laporan	25,00%	144.926.437,00	17,05	704.995.279,00	
5.02.01.2.08.02	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	3 laporan	350.000.000,00	350.000.000,00	2 laporan	25,00%	47.353.870,00	13,53	302.646.130,00	
5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yg disediakan	12 laporan	499.921.716,00	499.921.716,00	2 laporan	25,00%	97.572.567,00	19,52	402.349.149,00	
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis pemeliharaan BMD kantor BPKAD (unit)	39 unit	134.533.900,00	134.533.900,00	Unit	31,45%	30.018.700,00	22,31	104.515.200,00	
5.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 unit	20.000.000,00	20.000.000,00	1 unit	15,00%	2.655.000,00	13,28	17.345.000,00	

5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinan	15 unit	64.608.000,00	64.608.000,00	5 unit	33,00%	10.713.700,00	16,58	53.894.300,00	
5.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	22 unit	24.925.900,00	24.925.900,00	5 unit	22,00%	4.875.000,00	19,56	20.050.900,00	
5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara direhabilitasi	1 unit	25.000.000,00	25.000.000,00		50,00%	11.775.000,00	47,10	13.225.000,00	
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		285 dok, 21 lap, 120 org	396.254.446.165,00	373.760.467.697,00	Dokumen	33,07%	121.379.341.890,00	32,48	252.381.125.807,00	
5.02.02.2.01	<i>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</i>	Jumlah dokumen rencana Anggaran Daerah (Dokumen)	174 dok	498.458.313,00	388.640.848,00	Dokmen	11,34%	9.625.000,00	2,48	379.015.848,00	
5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	jumlah dokumen KUA dan PPAS yang disusun	2 dokumen	43.933.562,00	35.550.069,00	dokumen		0,00	-	35.550.069,00	
5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	jumlah Perubahan KUA dan Perubahan PPA yang disusun	2 dokumen	43.678.858,00	34.239.689,00	dokumen		0,00	-	34.239.689,00	-
5.02.02.2.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang di verifikasi	40 dokumen	16.301.779,00	14.403.422,00	dokumen		0,00	-	14.403.422,00	
5.02.02.2.01.04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah perubahan RKA-SKPD yang di verifikasi	40 dokumen	16.320.405,00	16.301.862,00	dokumen		0,00	-	16.301.862,00	
5.02.02.2.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA SKPD yang di verifikasi	40 dokumen	4.136.885,00	709.914,00	dokumen		0,00	-	709.914,00	

5.02.02.2.01.06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah perubahan DPA SKPD yang di verifikasi	40	dokumen	4.235.743,00	782.688,00	dokumen		0,00	-	782.688,00	
5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2	dokumen	179.730.163,00	128.322.702,00	dokumen	20,00%	7.000.000,00	5,45	121.322.702,00	
5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2	dokumen	158.964.406,00	133.185.391,00	1 dokumen	10,00%	750.000,00	0,56	132.435.391,00	
5.02.02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	6	dokumen	31.156.512,00	25.145.111,00	dokumen	15,00%	1.875.000,00	7,46	23.270.111,00	
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Presentase pemenuhan koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan Daerah			156.027.321,00	139.418.971,00	Dokmen, Orang	31,11%	22.900.000,00	16,43	116.518.971,00	
5.02.02.2.02.03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	84	dokumen	14.797.621,00	13.670.769,00	42 dokumen	50,00%	0,00	-	13.670.769,00	
5.02.02.2.02.04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	1	dokumen	56.308.402,00	44.978.904,00	dokumen	50,00%	21.550.000,00	47,91	23.428.904,00	

5.02.02.2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	2	dokumen	19.928.218,00	15.776.218,00	dokumen	25,00%	0,00	-	15.776.218,00	
5.02.02.2.02.10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	2	dokumen	9.999.829,00	9.999.829,00	Orang	25,00%	0,00	-	9.999.829,00	
5.02.02.2.02.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	120	orang	54.993.251,00	54.993.251,00	Orang	10,00%	1.350.000,00	2,45	53.643.251,00	
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Presentase pemenuhan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	2 lap, 22 dok, 120 org		985.150.644,00	802.139.755,00	Dokmen, Laporan, Orang	26,76%	105.795.850,00	13,19	696.343.905,00	
5.02.02.2.03.01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	7	laporan	119.997.162,00	101.268.464,00	1 dokumen	30,00%	29.075.220,00	28,71	72.193.244,00	

5.02.02.2.03.02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban (Dokumen)	4	dokumen	85.424.236,00	61.811.913,00	laporan	30,00%	16.896.900,00	27,34	44.915.013,00	
5.02.02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran (Laporan)	8	laporan	192.679.691,00	141.398.581,00	laporan	25,00%	24.237.000,00	17,14	117.161.581,00	
5.02.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi (Laporan)	6	laporan	294.798.856,00	280.910.874,00	dokumen	33,00%	18.849.930,00	6,71	262.060.944,00	
5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota (Dokumen)	6	dokumen	189.999.606,00	139.981.579,00	dokumen	15,00%	8.163.800,00	5,83	131.817.779,00	
5.02.02.2.03.07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah (Dokumen)	12	dokumen	34.996.370,00	28.383.646,00	2 dokumen	32,00%	8.573.000,00	30,20	19.810.646,00	
5.02.02.2.03.11	Pembinaan Akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	120	Orang	67.254.723,00	48.384.698,00	Orang	25,00%	0,00	-	48.384.698,00	

5.02.02.2.04.	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Presentase pemenuhan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	131 laporan	394.614.809.887,00	372.430.268.123,00	- -	33,11%	121.241.021.040,00	32,55	251.189.247.083,00	
5.02.02.2.04.08	Analisis Perencanaan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah laporan hasil Analisis Perencanaan Penyaluran Bantuan Keuangan	130 Laporan	290.376.263.769,00	290.376.263.769,00	Laporan	45,00%	121.241.021.040,00	41,75	169.135.242.729,00	
5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	104.238.546.118,00	82.054.004.354,00	Laporan		0,00	-	82.054.004.354,00	
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		26 lap, 60 dok, 80 org	8.810.565.478,00	8.239.861.481,00	Dokumen, Laporan, Orang	46,76%	5.275.586.481,00	64,03	2.964.275.000,00	
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Presentase capaian pengelolaan Barang Milik Daerah	26 lap, 60 dok, 80 org	8.810.565.478,00	8.239.861.481,00	dokumen	46,76%	5.275.586.481,00	64,03	2.964.275.000,00	
5.02.03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	2 dokumen	229.995.308,00	213.010.527,00	dokumen	50,00%	8.010.000,00	3,76	205.000.527,00	
5.02.03.2.01.02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	41 dokumen	5.506.883.190,00	5.372.048.864,00	dokumen	50,00%	4.408.103.581,00	82,06	963.945.283,00	
5.02.03.2.01.04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 dokumen	44.999.462,00	31.919.222,00	Laporan	100,00%	0,00	-	31.919.222,00	
5.02.03.2.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah	16 Laporan	614.999.052,00	605.504.298,00	Laporan	25,00%	44.973.500,00	7,43	560.530.798,00	

5.02.03.2.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1	Laporan	52.589.600,00	25.939.680,00	Laporan	25,00%	0,00	-	25.939.680,00	
5.02.03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	2	Laporan	902.110.024,00	782.016.827,00	Laporan	25,00%	52.120.900,00	6,66	729.895.927,00	
5.02.03.2.01.08	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	5	Laporan	198.790.991,00	45.112.746,00	Laporan	10,00%	0,00	-	45.112.746,00	
5.02.03.2.01.09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	2	Laporan	1.090.699.335,00	1.041.217.460,00	dokumen	70,00%	753.183.500,00	72,34	288.033.960,00	
5.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah serta dokumen sosialisasi	8	dokumen	81.499.596,00	59.249.411,00	Laporan	10,00%	1.995.000,00	3,37	57.254.411,00	
5.02.03.2.01.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	8	Laporan	24.999.651,00	20.089.374,00	Orang	25,00%	7.200.000,00	35,84	12.889.374,00	
5.02.03.2.01.13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	80	orang	62.999.269,00	43.753.072,00	Orang	25,00%	0,00	-	43.753.072,00	
	JUMLAH				416.824.350.751,00	393.169.751.897		35%	128.940.367.054	32,80	264.229.384.843,00	

Evaluasi atas Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan SKPD BPKAD Tahun 2025, sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 adalah dengan Pagu Anggaran sebesar Rp 416.824.350.751,- telah terealisasi sebesar Rp 128.940.367.054,- atau sebesar 32,80%. Adapun Evaluasi RENJA SKPD BPKAD Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I Tahun Anggaran 2025 sesuai pada Aplikasi E-Monev baik realisasi keuangan maupun realisasi fisik dapat disajikan sebagai berikut :

Evaluasi Hasil Renja Tahun 2025
TRIWULAN I
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan Renstra Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2025 (%)		SKP D Penanggungjawab	Keterangan
										I	II	III		IV													
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Semua Bidang																									
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			85.230.276.358		-		11.169.422.719		2.285.438.683		-		-		-		2.285.438.683		20,46%		2.285.438.683		2,68%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Persen)		107.175.051	0,00	-	100	13.927.904	-	-		-		-		-		-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun*) ()		52.237.558	0,00	-	7	8.930.693	-	-								-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada

		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	6,00	54.937.493	0,00	-	6	4.997.211	3	-						3	-	50,00%	0,00%	3,00	-	50,00%	0,00%		Tidak Ada
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Persen)		64.813.611.534	0,00	-	100	8.826.256.332	-	1.962.496.311		-	-	-	-	-	1.962.496.311	0,00%	22,23%	0,00	1.962.496.311	0,00%	6,08%		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		64.743.611.534	0,00	-	45	8.820.656.465	45	1.960.360.811						45	1.960.360.811	100,00%	22,22%	45,00	1.960.360.811	0,00%	3,03%		Tidak Ada
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	350,00	70.000.000	0,00	-	350	5.599.867	80	2.135.500						80	2.135.500	22,86%	38,13%	80,00	2.135.500	22,86%	3,05%		Tidak Ada
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Persen)		488.950.000	0,00	-	100	5.000.000	-	-		-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	55,00	294.950.000	0,00	-	1	-	-	-						-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	10,00	194.000.000	0,00	-	2	5.000.000	-	-						-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada

			Perundang-Undangan (Orang)																							
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah (Persen)		10.151.705.041	0,00	-	100	793.506.967	-	147.997.235	-	-	-	-	-	147.997.235	0,00%	18,65%	0,00	147.997.235	0,00%	13,67%			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1,00	91.189.174	0,00	-	1	9.984.679	-	-						-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5,00	799.169.836	0,00	-	8	112.405.496	4	61.993.000						4	61.993.000	50,00%	55,15%	4,00	61.993.000	80,00%	7,76%		Tidak Ada
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1,00	128.687.538	0,00	-	1	9.992.657	-	4.757.000						-	4.757.000	0,00%	47,60%	0,00	4.757.000	0,00%	3,70%		Tidak Ada
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2,00	341.508.493	0,00	-	2	39.977.935	2	3.908.800						2	3.908.800	100,00%	9,78%	2,00	3.908.800	100,00 %	1,14%		Tidak Ada
		Penyediaan Bahan/Material	*Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2,00	75.000.000	0,00	-	2	12.000.000	-	-						-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada

			(Paket)																							
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	200,00	7.200.000.000	0,00	-	200	555.375.000	77	77.338.435					77	77.338.435	38,50%	13,93%	77,00	77.338.435	38,50%	1,07%		Tidak Ada	
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1,00	1.338.400.000	0,00	-	1	28.771.200	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada	
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	*Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	3,00	177.750.000	0,00	-	1	25.000.000	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Persen)		3.646.472.000	0,00	-	100	546.275.900	-	-		-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	4,00	988.500.000	0,00	-	2	50.000.000	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada	
		Pengadaan Mebel	*Jumlah Paket	140,00	711.000.000	0,00	-	14	99.922.200	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada	

			Mebel yang Disediakan (Unit)																							
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	45,00	1.297.000.000	0,00	-	7	146.353.700	-	-						-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3,00	649.972.000	0,00	-	1	250.000.000	-	-						-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Ursan Pemerintah Daerah (Persen)		5.074.899.732	0,00	-	100	849.921.716	-	144.926.437	-	-	-	-	-	-	144.926.437	0,00%	17,05%	0,00	144.926.437	0,00%	5,65%		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1,00	2.450.000.000	0,00	-	3	350.000.000	2	47.353.870						2	47.353.870	66,67%	13,53%	2,00	47.353.870	200,00 %	1,93%		Tidak Ada
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12,00	2.624.899.732	0,00	-	12	499.921.716	-	97.572.567						-	97.572.567	0,00%	19,52%	0,00	97.572.567	0,00%	3,72%		Tidak Ada

		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah (1)		947.463.000	0,00	-	100	134.533.900	-	30.018.700		-	-	-	-	30.018.700	0,00%	22,31%	0,00	30.018.700	0,00%	13,96%		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1,00	138.200.000	0,00	-	1	20.000.000	1	2.655.000					1	2.655.000	100,00%	13,28%	1,00	2.655.000	100,00 %	1,92%		Tidak Ada
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	20,00	412.908.000	0,00	-	15	64.608.000	5	10.713.700					5	10.713.700	33,33%	16,58%	5,00	10.713.700	25,00%	2,59%		Tidak Ada
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	50,00	236.855.000	0,00	-	22	24.925.900	5	4.875.000					5	4.875.000	22,73%	19,56%	5,00	4.875.000	10,00%	2,06%		Tidak Ada
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	2,00	159.500.000	0,00	-	1	25.000.000	-	11.775.000					-	11.775.000	0,00%	47,10%	0,00	11.775.000	0,00%	7,38%		Tidak Ada
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)									84,29%	20,46%						

			(Dokumen)																							
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	*Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	40,00	28.398.080	0,00	-	40	782.688	-	-						-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	*Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (Dokumen)	2,00	1.164.744.700	0,00	-	2	128.322.702	-	7.000.000						-	7.000.000	0,00%	5,45%	0,00	7.000.000	0,00%	0,60%		Tidak Ada
		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	*Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD (Dokumen)	2,00	1.079.210.050	0,00	-	2	133.185.391	1	750.000						1	750.000	50,00%	0,56%	1,00	750.000	50,00%	0,07%		Tidak Ada
		Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	*Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran (Dokumen)	5,00	136.751.950	0,00	-	6	25.145.111	2	1.875.000						2	1.875.000	33,33%	7,46%	2,00	1.875.000	40,00%	1,37%		Tidak Ada
		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase capaian Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah (Persen)		1.217.006.447	0,00	-	100	139.418.971	-	22.900.000		-	-	-	-	-	22.900.000	0,00%	16,43%	0,00	22.900.000	0,00%	5,95%		

		Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	*Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD (Dokumen)	168,00	82.358.100	0,00	-	84	13.670.769	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Penatausahaan Pembiayaan Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah (Dokumen)	1,00	380.979.514	0,00	-	1	44.978.904	-	21.550.000							-	21.550.000	0,00%	47,91%	0,00	21.550.000	0,00%	5,66%		Tidak Ada
		Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas (Dokumen)	1,00	189.768.833	0,00	-	2	15.776.218	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	*Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan	2,00	98.900.000	0,00	-	2	9.999.829	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada

			an dan Pertanggung jawaban Sub Kegiatan (Dokumen)																							
		Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausah aan Keuangan Pemerintah Kabupaten/ Kota (Orang)	82,00	465.000.000	0,00	-	120	54.993.251	-	1.350.000						-	1.350.000	0,00%	2,45%	0,00	1.350.000	0,00%	0,29%		Tidak Ada
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Capaian Koordinasi dan Pelaksanaa n Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah (Persen)		6.529.510.585	0,00	-	100	802.139.755	-	105.795.850		-		-	-	-	105.795.850	0,00%	13,19%	0,00	105.795.850	0,00%	12,65%		
		Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaa n Akuntansi Penerimaan dan Pengeluara n Kas Daerah (Laporan)	12,00	521.058.652	0,00	-	7	101.268.464	2	29.075.220						2	29.075.220	28,57%	28,71%	2,00	29.075.220	16,67%	5,58%		Tidak Ada

		Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	*Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban (Dokumen)	3,00	1.037.602.827	0,00	-	4	61.811.913	-	16.896.900							-	16.896.900	0,00%	27,34%	0,00	16.896.900	0,00%	1,63%		Tidak Ada
		Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	*Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran (Laporan)	8,00	1.335.795.416	0,00	-	8	141.398.581	-	24.237.000							-	24.237.000	0,00%	17,14%	0,00	24.237.000	0,00%	1,81%		Tidak Ada
		Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	*Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi (Laporan)	1,00	1.400.000.000	0,00	-	6	280.910.874	2	18.849.930							2	18.849.930	33,33%	6,71%	2,00	18.849.930	200,00 %	1,35%		Tidak Ada

		Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	*Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota (Dokumen)	6,00	1.224.100.950	0,00	-	6	139.981.579	-	8.163.800						-	8.163.800	0,00%	5,83%	0,00	8.163.800	0,00%	0,67%		Tidak Ada
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah (Dokumen)	12,00	532.543.000	0,00	-	12	28.383.646	3	8.573.000						3	8.573.000	25,00%	30,20%	3,00	8.573.000	25,00%	1,61%		Tidak Ada
		Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	120,00	478.409.740	0,00	-	120	48.384.698	-	-						-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada

		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase capaian Penunjang Urusan Kewengana n Pengelolaa n Keuangan Daerah (Persen)		1.514.464.492.509	0,00	-	100	372.430.268.123	-	121.241.021.040	-	-	-	-	-	121.241.021.040	0,00%	32,55%	0,00	121.241.021.040	0,00%	8,81%				
		Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	*Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaa n dan Penyaluran Bantuan Keuangan (Laporan)	130,00	1.376.464.492.509	0,00	-	130	290.376.263.769	-	121.241.021.040					-	121.241.021.040	0,00%	41,75%	0,00	121.241.021.040	0,00%	8,81%		Tidak Ada		
		Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	*Jumlah Laporan Hasil Pengelolaa n Dana Darurat dan Mendesak (Laporan)	1,00	138.000.000.000	0,00	-	1	82.054.004.354	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada		
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								0,05%	32,48%								
										Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Rendah								
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH			32.270.129.547		-		8.239.861.481		5.275.586.481		-	-	-		5.275.586.481		64,03%		5.275.586.481		16,35%	Bada n Peng elolaa n Keua ngan dan Aset Daer ah			
		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Capaian Pengelolaa n Barang Milik Daerah (Persen)		32.270.129.547	0,00	-	100	8.239.861.481	-	5.275.586.481	-	-	-	-	-	5.275.586.481	0,00%	64,03%	0,00	5.275.586.481	0,00%	60,99%				
		Penyusunan Standar Harga	*Jumlah Standar Harga yang	1,00	593.995.307	0,00	-	2	213.010.527	-	8.010.000					-	8.010.000	0,00%	3,76%	0,00	8.010.000	0,00%	1,35%		Tidak Ada		

			Disusun (Dokumen)																								
		Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	*Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dokumen)	41,00	18.416.460.668	0,00	-	41	5.372.048.864	-	4.408.103.581						-	4.408.103.581	0,00%	82,06%	0,00	4.408.103.581	0,00%	23,94%			Tidak Ada
		Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	*Jumlah Kebijakan Pengelolaa n Barang Milik Daerah (Dokumen)	2,00	1.249.999.462	0,00	-	1	31.919.222	-	-						-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			Tidak Ada
		Penatausahaan Barang Milik Daerah	*Jumlah Laporan Penatausah aan Barang Milik Daerah (Laporan)	12,00	2.412.500.000	0,00	-	16	605.504.298	-	44.973.500						-	44.973.500	0,00%	7,43%	0,00	44.973.500	0,00%	1,86%			Tidak Ada
		Inventarisasi Barang Milik Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Inventarisas i (LHI) Barang Milik Daerah (Laporan)	1,00	444.589.600	0,00	-	1	25.939.680	-	-						-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			Tidak Ada
		Pengamanan Barang Milik Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Pengamana n Barang Milik Daerah (Laporan)	3,00	4.084.812.125	0,00	-	3	782.016.827	-	52.120.900						-	52.120.900	0,00%	6,66%	0,00	52.120.900	0,00%	1,28%			Tidak Ada
		Penilaian Barang Milik Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi	4,00	1.006.369.453	0,00	-	5	45.112.746	-	-						-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			Tidak Ada

			Penilaian Barang Milik Daerah (Laporan)																							
		Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Pengawasa n dan Pengendali an Pengelolaa n Barang Milik Daerah (Laporan)	3,00	2.563.128.335	0,00	-	2	1.041.217.460	-	753.183.500						-	753.183.500	0,00%	72,34%	0,00	753.183.500	0,00%	29,39%		Tidak Ada
		Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtangan an, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaa n, Pemanfaata n, Pemindahta nganan, Pemusnaha n, dan Penghapus an Barang Milik Daerah (Dokumen)	8,00	751.474.597	0,00	-	8	59.249.411	-	1.995.000						-	1.995.000	0,00%	3,37%	0,00	1.995.000	0,00%	0,27%		Tidak Ada
		Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	*Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun (Laporan)	8,00	246.800.000	0,00	-	8	20.089.374	-	7.200.000						-	7.200.000	0,00%	35,84%	0,00	7.200.000	0,00%	2,92%		Tidak Ada
		Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaa n Barang Milik Daerah Pemerintah	160,00	500.000.000	0,00	-	80	43.753.072	-	-						-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada

[illegible]

B. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD BPKAD

BPKAD Kabupaten Tanah Laut sebagai salah satu SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut berwenang dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Berkaitan dengan pengelolaan keuangan, BPKAD juga menjalankan tugas dan fungsi yang berkaitan dengan anggaran SKPD, selain juga tugas-tugas pengelolaan keuangan yang berkaitan dengan PPKD, seperti penyusunan KUA/PPAS, penyusunan RAPBD sampai menjadi DPA dan selanjutnya penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

BPKAD juga selain menangani kekayaan daerah yang menjadi tugas dan fungsinya selaku SKPD juga melaksanakan dan mengkoordinasikan pengelolaan kekayaan daerah yang menjadi milik Pemerintah Daerah untuk disajikan dalam laporan neraca daerah.

Secara garis besar pelayanan SKPD BPKAD terhadap penyelenggaraan baik dalam pengelolaan proses penyusunan anggaran dan pelaksanaan anggaran, proses penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah dapat berjalan dengan baik. hal ini bisa dilihat dari beberapa capaian kinerja indikator sebagai berikut :

- a. Sasaran Strategis Nomor 1 Terwujudnya Tata Kelola Keuangan yang Akuntabel dengan indikator Opini BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah capaian kinerjanya mencapai target yang telah ditetapkan. Rata-rata capaian kinerja pada Tahun 2024 sebesar 100%, dan pada Tahun 2023 juga mencapai rata-rata capaian kinerja sebesar 100%. Pada tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Tanah Laut mendapatkan Opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2023 untuk yang ke 11 (sebelas) kalinya, sehingga dengan demikian bahwa Opini WTP yang didapatkan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2024 terdapat peningkatan terhadap pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Tujuan BPKAD Kabupaten Tanah Laut yang tercantum dalam tahun Renstra BPKAD 2013-2018, tahun Renstra 2018-2023 dan Tahun Renstra 2024-2026, bahwa cita-cita BPKAD Kabupaten Tanah Laut yang tertuang dalam Renstra BPKAD dalam mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel, tertib, taat

pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab telah berhasil dilaksanakan 100%.

Untuk mendukung sasaran IKU BPKAD ini dilaksanakan dan menjadi Perjanjian Kinerja, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta tanggungjawab Bidang Belanja & Pembiayaan, Bidang Akuntansi, Bidang Pemanfaatan & Pengendalian Aset dan Bidang Penatausahaan Aset.

- b. Sasaran Strategis Nomor 2 Meningkatnya Sistem Pengendalian Ketersediaan Kas Daerah dengan indikator Persentase ketersediaan Kas daerah sesuai dengan SPD telah mendapatkan nilai sebesar 100% yaitu dengan penjelasan bahwa Kas daerah dapat dipenuhi sesuai dengan surat penyediaan dana yang telah diterbitkan oleh BPKAD, sehingga dapat diyakini bahwa surat penyediaan dana yang terbit dipastikan dapat dipenuhi dengan Kas daerah yang tersedia dan dapat dipastikan belanja daerah terbayar pada tahun anggaran bersangkutan.
- c. Sasaran Strategis Nomor 3 Meningkatnya Kesesuaian Penganggaran dengan Perencanaan dengan indikator Persentase Penganggaran yang sesuai dengan Perencanaan capaian kinerjanya melebihi mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 138,82%, yaitu dengan penjelasan bahwa penganggaran lebih besar dari pada perencanaan, hal ini disebabkan adanya Dana Alokasi Khusus, adanya tambahan Dana Intensif Fiskal, adanya tambahan DBH Sawit dan setelah adanya TKDD ada peluang untuk menambah volume Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang masih belum terakomodir alokasi anggaran pada RKPD, sehingga pada setiap tahun penganggaran tidak dapat diprediksi pada saat perencanaan karena ditahapan perencanaan Pemerintah kabupaten Tanah Laut telah menghitung kemampuan keuangan daerah untuk memenuhi volume Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan prioritas.
- d. Sasaran Strategis Nomor 4 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BPKAD dengan indikator Nilai SAKIP BPKAD yang merupakan IKU Kepala BPKAD Kabupaten Tanah Laut capaian kinerjanya melebihi target yang telah ditetapkan yaitu 101,04 %, bahwa rata-rata capaian kinerja pada Tahun 2018 adalah penilaian SAKIP Tahun 2017 sebesar 100,92% dan tahun 2019 adalah penilaian SAKIP Tahun 2018 adalah sebesar 113,61%, sedangkan rata-rata capaian kinerja pada Tahun 2020 adalah penilaian SAKIP Tahun 2019 sebesar 131,98%, sedangkan rata-rata capaian kinerja

pada tahun 2021 adalah penilaian SAKIP Tahun 2020 sebesar 130,75% mengalami penurunan dari tahun 2020 sebesar 1,23%. Pada tahun 2022 adalah penilaian SAKIP Tahun 2021 sebesar 116,67% mengalami penurunan dari tahun 2021 sebesar 14,08%. Pada tahun 2023 adalah penilaian SAKIP Tahun 2022 sebesar 116,43% mengalami penurunan dari tahun 2022. Pada tahun 2024 adalah penilaian SAKIP Tahun 2023 sebesar 101,04% mengalami penurunan dari tahun 2023. Sehingga dengan demikian pernyataan sasaran strategis nomor 4 yang menjadi tanggungjawab Sekretaris BPKAD Kab. Tanah Laut telah dilaksanakan dengan baik.

Untuk menggambarkan tabel realisasi capaian sasaran strategis beserta analisa capaiannya yaitu berjumlah 4 Sasaran Strategis dengan 4 indikator sasaran dapat dijelaskan per indikator sasaran strategis dengan target dan realisasinya serta dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dalam pembahasan ini akan dibandingkan selama 3 (tiga) tahun yaitu tahun 2022, 2023 dan 2024 sehingga tergambar capaian kinerja per sasaran serta penanggungjawabnya secara terinci dengan penjelasan berikut ini.

Persentase pengelolaan pelaporan keuangan SKPD Pemkab Tala berbasis Akrua, bahwa mulai tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Tanah Laut mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, pos-pos Ekuitas Dana pada Neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis kas menuju akrual (cash toward accrual) pada tahun 2015 direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai akuntansi berbasis akrual. Laporan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2015 dibuat berdasarkan Laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, adapun yang membuat Laporan Keuangan Daerah Tahun 2015 ini adalah Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) Kabupaten Tanah Laut. Sampai dengan tahun 2018 Laporan Keuangan SKPD berbasis akrual telah disampaikan oleh seluruh SKPD dan telah di Audit oleh BPK – RI.

Penyampaian Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang tepat waktu.

Penyampaian Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi

Keuangan Daerah (SIKD) sebagaimana telah diubah dengan PP No 56 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 04/PMK.07/2011 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan daerah diatur bahwa LPP APBD Tahun 2015 dan Tahun 2016 yang memuat laporan keuangan secara lengkap sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah daerah paling lambat 31 Agustus 2018 dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa batas waktu penyampaian Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun sebelumnya yaitu paling lambat pada tanggal 31 Agustus.

Dari uraian diatas dapat dijelaskan bahwa Opini WTP yang didapatkan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2024 terdapat peningkatan terhadap pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Tujuan BPKAD Kabupaten Tanah Laut yang tercantum dalam Renstra BPKAD Tahun 2024-2026, bahwa cita-cita BPKAD Kabupaten Tanah Laut yang tertuang dalam Renstra BPKAD Tahun 2024-2026 dalam mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel pada tahun 2024 telah berhasil dilaksanakan 100%.

Berhasilnya pelaksanaan kegiatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut tentunya sangat ditunjang oleh kualitas sumber daya aparatur, sumber dana serta dukungan dan partisipasi dari pihak-pihak terkait. Selain itu, masih terdapatnya kelemahan-kelemahan seperti terbatasnya tenaga profesional serta pelaksanaan tugas pada BPKAD sangat tergantung dari input SKPD lainnya sehingga diperlukan kerjasama yang baik dan harmonis dengan SKPD dalam mengelola keuangan dan aset daerah.

Adapun upaya yang dilakukan dalam mengatasi persoalan tersebut diantaranya dengan berupaya secara bertahap terus meningkatkan kualitas kinerja dan disiplin SDM aparatur pada BPKAD serta peningkatan sarana dan prasarana yang dapat mendukung operasional pelaksanaan tugas. Serta upaya untuk terus melakukan evaluasi terhadap kinerja baik pada waktu tahun berjalan maupun setelah akhir tahun sebagai pedoman dalam melakukan langkah-langkah perbaikan. Selain itu diperlukan peningkatan koordinasi dengan SKPD terkait serta kerjasama dengan institusi lain.

C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD.

BPKAD Kabupaten Tanah Laut selaku SKPD yang berwenang dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah, tentunya fokus yang menjadi perhatian penting dan menjadi isu-isu dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi BPKAD baik selaku SKPD maupun sebagai PPKD adalah berkenaan dengan masalah pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah.

Berdasarkan analisis Lingkungan Internal dan Lingkungan Eksternal (SWOT) di atas, maka dapat ditetapkan dan dirumuskan yang menjadi isu-isu strategis pada BPKAD Kabupaten Tanah Laut sesuai dengan tugas dan fungsinya yang harus mendapat prioritas dan penanganan secara sungguh-sungguh selama kurun waktu 2025-2029 sebagai berikut :

a. Peningkatan pengelolaan keuangan daerah

Peningkatan pengelolaan keuangan sangatlah vital, dimulai dari proses penyusunan anggaran, pelaksanaan belanja, penatausahaan, dan pertanggungjawaban. Proses penyusunan anggaran haruslah secermat mungkin, karena apabila salah pada tahap penganggaran, sudah tentu akan semakin bertambah salah pada waktu pelaksanaan belanja, sehingga akan menyulitkan pada waktu penatausahaan dan akan diragukan akuntabilitasnya saat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, melalui perencanaan penganggaran yang tepat, akurat, wajar, memenuhi aspek kepatutan, efisien dan efektif, taat pada peraturan perundang-undangan, maka akan membawa manfaat yang sangat besar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Begitu juga dengan pelaksanaan belanja yang benar, akuntabel dan dikelola dengan baik tentunya akan memberikan nilai positif bagi pemerintah daerah dan akan mendapatkan Opini yang optimal bagi pengelolaan keuangan daerah yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang setiap tahunnya dilakukan audit oleh BPK RI.

b. Kelengkapan penyajian penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, merupakan isu-isu yang tidak bisa dikesampingkan, karena begitu penting dan sangat

menentukan, tidak saja bagi kredibilitas Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut, tetapi juga bagi nasib rakyat Tanah Laut. Proses penganggaran yang baik, kesesuaian pelaksanaan belanja, penatausahaan keuangan yang tertib, dan pertanggungjawaban keuangan yang akuntabel, bukan merupakan hasil akhir dalam pengelolaan keuangan daerah, karena apabila kelengkapan dalam penyajian penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah masih banyak kekurangannya, maka penilaian atau opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah oleh BPK RI menjadi kurang/minus pula. Dalam penyajian penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah haruslah mengikuti kaidah-kaidah dan aturan yang telah ditetapkan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Tentunya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang dibuat dan disampaikan setiap tahun mengharapkan mendapat opini yang terbaik, karena hal ini sebagai bentuk cerminan keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance).

c. Peningkatan pengelolaan aset daerah.

Aspek lain yang menjadi isu penting bagi pelaksanaan tugas dan fungsi BPKAD adalah berkaitan dengan peningkatan pengelolaan aset daerah. Disadari bahwa untuk pengelolaan aset daerah dahulu-dahulunya terpinggirkan, namun sekarang ini menjadi hal yang sangat penting dan vital dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, karena bagaimana mungkin sebuah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dapat disusun dan disajikan dengan benar dan dapat diyakini kewajarannya kalau pengelolaan aset daerah yang disajikan tidak tertib dan meragukan. Oleh karena itu penataan aset daerah menjadi salah satu prioritas untuk segera dituntaskan dan terus dilakukan bagi tersajinya suatu Neraca SKPD dan Neraca Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut yang dapat diyakini kebenaran dan kewajarannya.

Masalah-masalah yang dihadapi pada pengelolaan keuangan dan aset daerah

a. Permasalahan Pengelolaan Keuangan Daerah

- 1) Pelaksanaan kegiatan Pembahasan KUA-PPAS maupun Rancangan APBD antara TAPD dengan Badan Anggaran DPRD biasanya

diselesaikan pada akhir waktu yang ditetapkan oleh ketentuan perundangan, sehingga harus disiapkan dalam waktu yang sangat terbatas dan kemungkinan untuk terjadi kekeliruan pada tahapan selanjutnya menjadi lebih besar.

- 2) Berkas pengajuan penerbitan SP2D ada yang kurang lengkap, tidak sesuai dengan Surat Edaran Bupati Tanah Laut tentang Penatausahaan Keuangan Daerah.
- 3) Rekening Penerima yang tercantum pada SPM sering ada kesalahan, sehingga perlu dilakukan perbaikan.
- 4) Keterlambatan dalam menyampaikan kembali berkas yang diperbaiki.
- 5) Ada beberapa SKPD yang lambat menyampaikan berkas SP2D ke Bank Umum Daerah sehingga dana yang masuk ke penerima dana mengalami keterlambatan.
- 6) Berkas administrasi pendukung proposal pencairan dana tidak lengkap dan perlu diverifikasi ulang.
- 7) Penggunaan dana hibah dan bantuan sosial yang tidak sesuai dengan RAB yang telah di usulkan.
- 8) Penyampaian usulan pencairan dana hibah dan bantuan sosial dilakukan pada minggu ke-2 bulan Desember, sehingga masih terdapat penyaluran di akhir Desember yang seharusnya pada akhir Desember tidak ada lagi penyaluran dana hibah dan bantuan sosial.
- 9) Kurangnya kemampuan SKPD dalam mengelola waktu penyampaian usulan pencairan dana hibah dan bantuan sosial sehingga dana hibah dan bantuan sosial tidak tersalur 100%.
- 10) SKPD tidak melaporkan perubahan pemegang user simcloud dan kurangnya pengarsipan user simcloud sehingga SKPD berulang kali meminta password dan user simcloud.
- 11) Kegiatan cek pendapatan mengalami kendala dikarenakan SKPD telat menginput ke SIMDA, informasi transfer dana masuk ke kasda sering kurang jelas uraiannya, sehingga untuk dana transfer perlu waktu untuk mengidentifikasi masuk ke pendapatan SKPD yang sebenarnya, serta SKPD terlambat memberikan bukti STS pengembalian untuk tahun berjalan dan tahun yang telah lewat.
- 12) Masih ada beberapa Bendahara Penerimaan SKPD yang belum memahami Simda Keuangan dikarenakan ada pergantian bendahara

penerimaan, input data penerimaan oleh pembantu bendahara penerimaan atau pegawai PTT, sehingga bila ada kesalahan inputan data yang ditemukan oleh Bidang Akuntansi BPKAD akan kesulitan menjelaskan perbedaan data/kesalahan input data Antara Simda Keuangan dengan Rekening Koran Kas Daerah. Di samping itu kendala yang dihadapi oleh Bendahara Penerimaan dalam penginputan pendapatan adalah pada waktu menginput pendapatan untuk pengurangan piutang.

- 13) Masih banyak bendahara yang belum paham tentang cara penjurnalan asset,
- 14) Kurangnya kerjasama antara PPTK, bendahara pengeluaran dan pengurus barang sehingga menghambat penyusunan LKPD.

b. Solusi Mengatasi Masalah Keuangan Daerah

- 1) Karena pelaksanaan tahapan/proses penyusunan APBD melibatkan banyak pihak diantaranya Badan Anggaran DPRD, TAPD, Inspektorat dan SKPD sehingga kekeliruan berupa kurang lengkapnya data maupun informasi sulit untuk dihindari, hal ini bisa diminimalkan dengan koordinasi yang lebih baik diantara pihak-pihak yang terkait.
- 2) Melaksanakan sosialisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku secara berkelanjutan.
- 3) Melakukan sosialisasi terhadap PPK-SKPD terhadap Verifikasi SPP yang dibuat oleh Bendahara Pengeluaran.
- 4) Melakukan sosialisasi terhadap Bendahara Pengeluaran yang masih baru.
- 5) Melaksanakan sosialisasi Peraturan Bupati dan SOP tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial, kepada SKPD yang langsung berkaitan dengan masyarakat pemohon hibah dan bantuan sosial agar di informasikan kepada masyarakat.
- 6) Melakukan koordinasi dengan SKPD terkait dengan kelengkapan berkas dan RAB yang tidak sesuai antara usulan dengan usulan pencairan.

- 7) Melakukan koordinasi dengan SKPD terkait serta dengan bidang akuntansi terkait Surat Edaran Bupati tentang langkah-langkah menghadapi akhir tahun.
- 8) Mengingatkan kepada SKPD agar dapat menginformasikan dengan segera saat terjadi perubahan pemegang SIMCLOUD dan untuk menyimpan dengan baik user dan password yang digunakan.
- 9) Berkoordinasi dengan subid akuntansi pendapatan dan piutang dan BAPENDA agar dapat menginformasikan kepada bendahara Penerimaan untuk sesegera mungkin melakukan input data pendapatan.
- 10) Melakukan rekonsiliasi kas BOS tiap semester dengan Dinas Pendidikan
- 11) Memberikan pembinaan kepada Bendahara Penerimaan tersebut agar bisa memahami inputan data penerimaan pada Simda Keuangan.
- 12) Pemberian penghargaan kepada bendahara penerimaan terbaik yang mengelola pendapatan berdasarkan kriteria penilaian antara lain kepatuhan, ketepatan waktu, tidak mendapat sanksi disiplin, tingkat kehadiran, beban kerja, responsif dan komunikatif.
- 13) Melakukan pendataan terhadap Bendahara Penerimaan yang belum memahami Simda Keuangan;
- 14) Melakukan diskusi dan koordinasi permasalahan input data penerimaan pada Simda Keuangan;
- 15) Memberikan bantuan pendampingan pembelajaran pemahaman Simda Keuangan kepada Bendahara Penerimaan.
- 16) Melakukan koordinasi dengan pimpinan terkait penandatanganan laporan,
- 17) Mengingatkan kembali bendahara pengeluaran yang dianggap selalu lalai dalam pelaksanaan rekon,
- 18) Dilakukan pembinaan terhadap SKPD terkait langkah-langkah penjurnalan asset,
- 19) Melaksanakan pendekatan kepada PPTK, bendahara pengeluaran dan pengurus barang agar laporan disampaikan tepat waktu agar tidak menghambat penyusunan LKPD.

c. Permasalahan Pengelolaan Aset Daerah

- 1) Banyaknya jumlah aset yang besar dan lokasi yang menyebar di 11 kecamatan, sehingga memerlukan waktu dan SDM yang lebih.
- 2) Adanya ancaman/tekanan dari pihak ketiga/masyarakat dalam pengamanan aset.
- 3) Kurangnya kerjasama masyarakat dalam melengkapi berkas administrasi pengamanan.
- 4) Anggaran yang terbatas karena adanya Refocusing Anggaran untuk penanganan Pandemi Covid-19.
- 5) Adanya amanat Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 130/763/SJ Tanggal 27 Januari 2020 yang mengisyaratkan percepatan implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sehingga diperlukan perubahan terhadap SSH Tahun 2021. Karena data SSH awal yang telah siapkan adalah data untuk keperluan Aplikasi Simda Keuangan, sehingga mesti dilakukan perubahan dengan mengeluarkan unsur PPN dari Standar Satuan Harga Tahun 2021.
- 6) Kurangnya kesadaran pengurus barang dalam menyusun laporan-laporan aset.
- 7) Penilaian pemanfaatan BMD oleh Tim Penilai dari KPKNL Banjarmasin.
- 8) Pemerintah Kab. Tanah Laut telah mengajukan permohonan penilaian pemanfaatan barang milik daerah berupa sewa sebanyak 2 kali permohonan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Banjarmasin.

Namun berdasarkan surat dari Kepala KPKNL Banjarmasin nomor S-1983/WKN.12/KNL.03/2020 tanggal 14 Desember 2020 perihal Permohonan penilaian BMD 2020 disampaikan bahwa pihak KPKNL Banjarmasin tidak bisa melakukan penilaian dikarenakan KPKNL Banjarmasin sedang melaksanakan penyelesaian reval BMN 2020 dengan target penyelesaian sampai dengan akhir Desember 2020. Dan saat ini seluruh Penilai Pemerintah pada KPKNL Banjarmasin fokus penyelesaian perbaikan kualitas laporan penilaian kembali BMN. Oleh karena itu kegiatan penilaian barang milik daerah tidak tercapai, yaitu dengan nilai capaian 0%.

- 9) Direncanakan kegiatan sosialisasi pemanfaatan dan penggunaan barang milik daerah dilaksanakan dengan cara pemberian materi secara langsung kepada peserta sosialisasi dengan sasaran Peserta yaitu aparat desa di 11 Kecamatan serta Pengguna Barang dan Pengurus barang di tingkat Kabupaten. Namun dengan adanya refocusing anggaran serta adanya pandemic Covid-19 maka kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan. Namun sosialisasi tetap dapat dilakukan dengan cara penyebaran informasi melalui penyerahan buku sosialisasi pemanfaatan dan penggunaan BMD yang dapat dijadikan pedoman dan rujukan dalam pelaksanaannya.
- 10)Pemanfaatan BMD memberikan peluang bagi daerah untuk meningkatkan PAD serta meningkatkan fasilitas publik. Namun faktanya banyak asset yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang belum mampu menghasilkan keuntungan bagi daerah, dengan pengertian bahwa pemanfaatan asset belum optimal serta rendahnya fungsi manfaat asset.
- 11)Pandemi Covid 19 melanda Kabupaten Tanah Laut, akibatnya banyak anggaran dialihkan untuk Belanja Tak terduga , sehingga terjadi Refocusing Anggaran. Anggaran menjadi terbatas karena banyak difocusing untuk Percepatan Penanganan Pandemi Covid 19 . Hal ini yang menyebabkan tidak terlaksananya kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD untuk Pencatatan Neraca Aset Daerah.
- 12)Kurangnya kerjasama antara PPTK, bendahara pengeluaran dan pengurus barang sehingga menghambat penyusunan LKPD
- 13)Pembiayaan
Tahun Anggaran 2020 belum tersedianya dana untuk penilai publik sehingga kegiatan penilaian hanya dengan penilai pemerintah (KPKNL);
- 14)Kebijakan
Adanya kebijakan dari pemerintah pusat untuk refocusing APBD dan adanya pandemi covid 19, sehingga anggaran untuk lelang BMD yang semula dianggarkan tidak bisa terealisasi, ketergantungan dengan KPKNL untuk penilaian BMD yang akan dilelang, perjalanan dinas dibatasi dan skala prioritas, sehingga serapan anggaran Subbid Pemindahtangan, Pemusnahan dan Penghapusan sangat rendah;

15) Kurangnya Jumlah dan Kualitas SDM aparatur

Dalam pelaksanaan kegiatan diperlukan jumlah dan kualitas SDM aparatur yang memadai, dimana pada Sub Bidang Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan hanya terdapat 1 (satu) Kasubbid dan 1 (satu) staf dari PTT, sehingga sulit untuk pembagian tugas;

16) Ketergantungan dengan pihak lain

Pada kegiatan pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan selalu tergantung kepada pemohon, sehingga sulit membuat target yang harus direncanakan, sehingga memerlukan kemampuan memprediksi kegiatan yang akan datang;

17) Belum Adanya Penilai Internal

Belum adanya penilai internal jadi kendala dalam kegiatan penilaian karena harus menganggarkan kembali untuk penilai eksternal seperti KPKNL sebagai penilai pemerintah dan anggaran untuk penilai publik.

d. Solusi Mengatasi Masalah Pengelolaan Aset Daerah

- 1) Kembali mengajukan permohonan penambahan anggaran
- 2) Membuat permohonan penambahan SDM serta meningkatkan kinerja SDM yang sudah ada.
- 3) Membuat permohonan petugas keamanan ke instansi terkait dalam melaksanakan pengamanan aset.
- 4) Melaksanakan pendekatan/sosialisasi kepada pihak ketiga/masyarakat dalam tertib administrasi kelengkapan berkas pengamanan BMD.
- 5) Kembali mengajukan permohonan penambahan anggaran.
- 6) Terus melaksanakan pendekatan/sosialisasi kepada pihak SKPD khususnya pengurus barang dalam tertib administrasi dan pelaporan-pelaporan barang persediaan.
- 7) Melakukan inventarisasi pemanfaatan dan penggunaan barang milik daerah lanjutan untuk lebih mengoptimalkan keakuratan data terkait pemanfaatan dan penggunaan BMD di Kab. Tanah Laut.
- 8) Melakukan sosialisasi pemanfaatan dan penggunaan BMD secara intensif dengan sasaran kegiatan langsung ke SKPD di lingkup Pemerintah Kab. Tanah Laut .
- 9) Melakukan pembenahan administrasi pemanfaatan dan penggunaan BMD agar sesuai dengan ketentuan yaitu Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Daerah Kab. Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

- 10) Pembahasan dan Penyusunan Peraturan tentang penilaian BMD yang dimanfaatkan.
- 11) Pembentukan tim penilai pemanfaatan BMD tingkat Kabupaten.
- 12) Peningkatan pengawasan terhadap BMD yang dimanfaatkan dengan melibatkan Instansi terkait.
- 13) Mendorong pemanfaatan dan penggunaan BMD yang dapat menghasilkan keuntungan bagi daerah atau yang mendatangkan PAD
- 14) Mengusulkan kembali Kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD agar BMD SKPD yang belum dinilai bisa dilakukan penilaian
- 15) Meningkatkan Kinerja SDM Pengurus Barang agar lebih tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah khususnya dalam Penyampaian Laporan Barang Milik Daerah .
- 16) Pemberian penghargaan kepada pengurus barang SKPD terbaik yang mengelola barang milik daerah (BMD) SKPD.
- 17) Melaksanakan pendekatan kepada PPTK, bendahara pengeluaran dan pengurus barang agar laporan disampaikan tepat waktu agar tidak menghambat penyusunan LKPD.
- 18) Efisiensi dana yang ada untuk kegiatan semaksimal mungkin, dan menganggarkannya kembali ditahun yang akan datang;
- 19) Memaksimalkan SDM yang ada serta memanfaatkan SDM subbid lain dalam Bidang Penatausahaan Aset yang longgar dalam kegiataanya dalam bentuk kerjasama dalam Tim;
- 20) Bekerjasama dengan Bidang lain untuk bisa membuat target dalam kegiatan terutama subbid perencanaan dan kebutuhan barang, dimana RKBMD yang disampaikan SKPD dapat dijadikan referensi kegiatan;
- 21) Melaporkan dengan pimpinan dan berupaya untuk bisa dianggarkan untuk pendidikan / pelatihan penilai bmd bagi aparatur.
- 22) Menyiapkan data dan format pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
- 23) Menyiapkan Data SDM aparatur untuk mengikuti Diklat Penilai BMD;
- 24) Menyiapkan perangkat lunak untuk lelang on line (E-Auction);

D. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan.

Dari 3 program dan 12 kegiatan dan 58 Sub Kegiatan yang dilaksanakan di Tahun Anggaran 2025 adalah program dan kegiatan sesuai dengan renstra SKPD BPKAD yang substansi kegiatannya disesuaikan dengan isu-isu penting terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi BPKAD yang harus segera diatasi, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan, dan pengelolaan kekayaan daerah. Usulan program dan kegiatan di luar dua bidang tersebut adalah sebagai pendukung untuk tiga bidang di atas yang sangat diperlukan bagi keberhasilan pelaksanaan tiga bidang utama tersebut.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Perubahan Rencana Kerja merupakan penjabaran lebih lanjut dari sasaran, program, kegiatan dan Indikator Kinerja kegiatan. Indikator kinerja pada BPKAD Kabupaten Tanah Laut pada dasarnya sama dengan ruang lingkup kerja instansi lainnya dimana yang dimaksudkan adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan/dianggarkan.

A. Tujuan

Tujuan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 – 2029 adalah :

1. Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pernyataan tujuan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut sepenuhnya mengacu pada Pernyataan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang tertuang dalam RPJMD 2025-2029. Hal ini dapat dipahami mengingat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut merupakan bagian integral atau unsur dari Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, sudah selayaknya tujuan yang dikemukakan sepenuhnya mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

Pernyataan tujuan BPKAD Kabupaten Tanah Laut di atas, mengandung makna adanya tekad yang kuat untuk menjadikan BPKAD Kabupaten Tanah Laut handal dan profesional dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, karena bukan pekerjaan mudah untuk mencapai akuntabel dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah. Melalui tujuan tersebut diharapkan BPKAD Kabupaten Tanah Laut menjadi motor penggerak bagi SKPD-SKPD lainnya dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam mewujudkan apa yang menjadi visi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

Akuntabilitas adalah perwujudan kewajiban suatu Instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah

ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah). Sesuai kerangka konsep akuntansi pemerintahan, akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Berdasarkan uraian itu maka pernyataan tujuan BPKAD Kabupaten Tanah Laut di atas dapat diartikan bahwa Pengelolaan keuangan, dan pengelolaan aset daerah dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tujuan yang telah ditetapkan BPKAD Kabupaten Tanah Laut merupakan implementasi dari pernyataan organisasi yang akan dicapai dan dilaksanakan dari kurun waktu 1 (satu) tahun hingga 5 (lima) tahun sehingga memudahkan bagi Kepala Badan beserta jajarannya untuk mencapai kinerja yang diinginkan sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah.

B. Sasaran

Sasaran merupakan bagian integral dari proses perencanaan organisasi. Penjabaran dari tujuan secara lebih spesifik dan terukur dirumuskan lebih lanjut ke dalam sasaran. Oleh karena itu sasaran haruslah terinci dan dapat diukur. Uraian dari tujuan dan sasaran jangka panjang yang akan di capai oleh BPKAD Kabupaten Tanah Laut sehubungan dengan visi dan misi yang ditetapkan. Konsep dasar strategi adalah memberdayakan kekuatan untuk mencapai suatu keadaan yang diinginkan, jadi merupakan cara atau langkah mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program/kegiatan. Berdasarkan tujuan dan sasaran BPKAD Kabupaten Tanah Laut, maka strategi dan kebijakan yang akan dilakukan periode 2025-2029.

Adapun sasaran yang ingin dicapai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Setelah ditetapkan Tujuan, Sasaran Strategi dan Kebijakan adalah disusunnya program dan kegiatan serta Sub Kegiatan sebagai langkah operasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam Visi. Program dan kegiatan serta Sub Kegiatan yang disusun tentulah harus sesuai dengan tugas dan fungsi yang dimiliki oleh BPKAD Kabupaten Tanah Laut, dalam rangka menjawab tantangan/permasalahan dan isu-isu strategis sebagaimana telah dirumuskan.

Renstra yang disusun oleh SKPD tentulah harus bersinergi dengan RPJMD nya, karena hal ini terkait dengan pencapaian visi, misi yang ada dalam RPJMD. Oleh karena itu penetapan indikator kinerja oleh SKPD dalam Renstra untuk lima tahun ke depan harus mendukung bagi pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Arah kebijakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut dalam pencapaian tujuan dan sasaran adalah :

- a. Pengembangan penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah
- b. Pengembangan penyelenggaraan kekayaan daerah
- c. Pengembangan penyelenggaraan pelayanan administrasi, sarana/prasarana dan sumberdaya aparatur.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Untuk mewujudkan kebijakan yang telah ditetapkan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut menjabarkannya ke dalam program-program kerja lima tahunan dan program kerja tahunan.

Langkah lebih lanjut setelah ditetapkannya Program adalah ditetapkannya Kegiatan yang akan dilaksanakan melalui Sub Kegiatan dan dengan Sub Kegiatan inilah nantinya akan diimplementasikan lebih lanjut ke dalam RKA Perubahan SKPD yang akan dimasukkan dalam APBD Perubahan yang tentunya setelah melalui proses yang berlaku sesuai ketentuan, dan baru bisa dilaksanakan setelah menjadi DPA Perubahan SKPD.

A. Program

Adapun Program-program dimaksud pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - a) Sasaran : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BPKAD
 - b) Indikator : Sakip Perangkat Daerah, Persentase Kepuasan Pegawai pada Layanan Perangkat Daerah.
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a) Sasaran : Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
 - b) Indikator : Persentase Penyampaian Dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang tepat waktu, Persentase Penyampaian Dokumen Penganggaran Keuangan Pemerintah Daerah yang tepat waktu, Persentase Penyampaian Dokumen Penatausahaan Keuangan Pemerintah Daerah yang tepat waktu.
3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
 - a) Sasaran : Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
 - b) Indikator : Persentase Penyampaian Neraca Aset Tetap, Aset Lancar berupa Persediaan dan Aset Lainnya yang tepat waktu, Persentase Barang Milik Daerah yang dimanfaatkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

B. Kegiatan

Adapun kegiatan-kegiatan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a) Sasaran : Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Kinerja
 - b) Indikator : Persentase Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a) Sasaran : Meningkatnya Kualitas Penatausahaan dan Pelaporan
 - b) Indikator : Persentase Kualitas Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a) Sasaran : Meningkatnya Kualitas Administrasi Kepegawaian SKPD
 - b) Indikator : Persentase Kualitas Administrasi Kepegawaian SKPD
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a) Sasaran : Meningkatnya Kualitas Administrasi Umum SKPD
 - b) Indikator : Persentase Kualitas Administrasi Umum SKPD
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a) Sasaran : Meningkatnya Kualitas sarana dan prasarana penunjang kinerja Perangkat Daerah
 - b) Indikator : Persentase Aset dalam Kondisi Baik
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah
 - a) Sasaran : Meningkatnya Kualitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah SKPD
 - b) Indikator : Persentase Kualitas Kualitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah SKPD
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a) Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah SKPD
 - b) Indikator : Persentase Kualitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah SKPD
8. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
 - a) Sasaran : Meningkatnya Kualitas Penyusunan Rencana Anggaran Daerah.

- b) Indikator : Persentase Kualitas Penyusunan Rencana Anggaran Daerah.
- 9. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
 - a) Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Perbendaharaan Daerah.
 - b) Indikator : Persentase Kualitas Pengelolaan Perbendaharaan Daerah.
- 10. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
 - a) Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah.
 - b) Indikator : Persentase Kualitas Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah.
- 11. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a) Sasaran : Meningkatnya Kualitas Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - b) Indikator : Persentase Kualitas Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 12. Pengelolaan Barang Milik Daerah
 - a) Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah.
 - b) Indikator : Persentase Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah.

C. Sub Kegiatan

Adapun Sub Kegiatan – Sub Kegiatan pada tahun 2025 sebanyak 58 Sub Kegiatan adalah sebagai berikut :

- 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - a) Sasaran : Tersedianya Dokumen Perencanaan SKPD
 - b) Indikator : Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD yang tersusun
- 2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a) Sasaran : Tersedianya Laporan Evaluasi Kinerja SKPD
 - b) Indikator : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tersusun
- 3. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - a) Sasaran : Tersedianya Pelayanan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN SKPD 12 bulan
 - b) Indikator : Jumlah pembayaran Gaji, Tunjangan, Jaminan Kesehatan ASN*) (bulan)

4. Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD Akuntansi SKPD
 - a) Sasaran : Tersedianya Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD Akuntansi SKPD
 - b) Indikator : Jumlah dokumen Penatausahaan Keuangan SKPD yang tersusun
5. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.
 - a) Sasaran : Tersedianya paket pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya
 - b) Indikator : Jumlah Pengadaan paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya
6. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
 - a) Sasaran : Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
 - b) Indikator : Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (orang)
7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - a) Sasaran : Tersedianya paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b) Indikator : Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - a) Sasaran : Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - b) Indikator : Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor
9. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - a) Sasaran : Tersedianya Peralatan Rumah Tangga
 - b) Indikator : Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan*)
10. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - a) Sasaran : Tersedianya Paket Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan SKPD
 - b) Indikator : Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan
11. Penyediaan Bahan/Material
 - a) Sasaran : Tersedianya Bahan/Material
 - b) Indikator : Jumlah Penyediaan Bahan / Material

12. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

- a) Sasaran : Tersedianya Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- b) Indikator : Jumlah penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

13. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

- a) Sasaran : Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- b) Indikator : Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

14. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

- a) Sasaran : Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- b) Indikator : Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

15. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

- a) Sasaran : Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- b) Indikator : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

16. Pengadaan Mebel

- a) Sasaran : Tersedianya Mebel
- b) Indikator : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan

17. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

- a) Sasaran : Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya
- b) Indikator : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan

18. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

- a) Sasaran : Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- b) Indikator : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan

19. Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik

- a) Sasaran : Tersedianya Laporan Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik

- b) Indikator : Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan
- 20. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - a) Sasaran : Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - b) Indikator : Jumlah laporan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yg disediakan
- 21. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - a) Sasaran : Tersedianya Unit Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b) Indikator : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya
- 22. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - a) Sasaran : Tersedianya Unit Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - b) Indikator : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinan
- 23. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - a) Sasaran : Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - b) Indikator : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara
- 24. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - a) Sasaran : Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - b) Indikator : Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 25. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
 - a) Sasaran : Tersedianya Dokumen Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS.
 - b) Indikator : Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan PPA yang disusun.
- 26. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS

- a) Sasaran : Tersedianya Dokumen Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS.
 - b) Indikator : Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPA yang disusun.
27. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD
- a) Sasaran : Tersedianya Dokumen Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD.
 - b) Indikator : Jumlah dokumen RKA-SKPD yang di verifikasi.
28. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD
- a) Sasaran : Tersedianya Dokumen Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD.
 - b) Indikator : Jumlah Dokumen perubahan RKA-SKPD yang di verifikasi.
29. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD
- a) Sasaran : Tersedianya Dokumen Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD
 - b) Indikator : Jumlah dokumen DPA SKPD yang di verifikasi
30. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD
- a) Sasaran : Tersedianya Dokumen Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD.
 - b) Indikator : Jumlah dokumen perubahan DPA SKPD yang di verifikasi.
31. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
- a) Sasaran : Tersedianya Dokumen Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
 - b) Indikator : Jumlah dokumen Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
32. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
- a) Sasaran : Tersedianya Dokumen Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD

- b) Indikator : Jumlah Dokumen Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
- 33. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
 - a) Sasaran : Tersedianya Dokumen Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
 - b) Indikator : Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
- 34. Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD.
 - a) Sasaran : Tersedianya Dokumen Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
 - b) Indikator : Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
- 35. Penatausahaan Pembiayaan Daerah
 - a) Sasaran : Tersedianya Dokumen Penatausahaan Pembiayaan Daerah
 - b) Indikator : Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah
- 36. Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas
 - a) Sasaran : Tersedianya Dokumen Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah
 - b) Indikator : Jumlah Dokumen Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah
- 37. Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawab Sub kegiatan
 - a) Sasaran : Tersedianya Dokumen Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan

- b) Indikator : Jumlah Dokumen Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan.
- 38. Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
 - a) Sasaran : Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
 - b) Indikator : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
- 39. Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
 - a) Sasaran : Tersedianya Laporan Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
 - b) Indikator : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
- 40. Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban
 - a) Sasaran : Tersedianya Dokumen Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban
 - b) Indikator : Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban
- 41. Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran
 - a) Sasaran : Tersedianya Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran
 - b) Indikator : Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran
- 42. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
 - a) Sasaran : Tersedianya Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
 - b) Indikator : Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi (Laporan)

43. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
- a) Sasaran : Tersedianya Dokumen Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
 - b) Indikator : Jumlah Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota (Dokumen)
44. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah
- a) Sasaran : Tersedianya Dokumen Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah
 - b) Indikator : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah
45. Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota
- a) Sasaran : Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota
 - b) Indikator : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota (orang)
46. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
- a) Sasaran : Tersedianya Laporan Perencanaan Penyaluran Bantuan Keuangan
 - b) Indikator : Jumlah laporan hasil Analisis Perencanaan Penyaluran Bantuan Keuangan
47. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
- a) Sasaran : Tersedianya Laporan Dana Darurat dan Mendesak
 - b) Indikator : Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
48. Penyusunan Standar Harga

- a) Sasaran : Tersedianya Dokumen Penyusunan Standar Harga
 - b) Indikator : Jumlah Standar Harga yang Disusun
49. Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah
- a) Sasaran : Tersedianya Dokumen Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah
 - b) Indikator : Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah
50. Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah
- a) Sasaran : Tersedianya Dokumen Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah
 - b) Indikator : Jumlah Dokumen Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah
51. Penatausahaan Barang Milik Daerah
- a) Sasaran : Tersedianya Dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah
 - b) Indikator : Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah
52. Inventarisasi Barang Milik Daerah
- a) Sasaran : Tersedianya Laporan Inventarisasi Barang Milik Daerah
 - b) Indikator : Jumlah laporan hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah (Dokumen)
53. Pengamanan Barang Milik Daerah
- a) Sasaran : Tersedianya Laporan Pengamanan Barang Milik Daerah
 - b) Indikator : Jumlah laporan hasil Pengamanan Barang Milik Daerah
54. Penilaian Barang Milik Daerah
- a) Sasaran : Tersedianya Laporan Penilaian Barang Milik Daerah
 - b) Indikator : Jumlah laporan hasil Penilaian Barang Milik Daerah
55. Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah
- a) Sasaran : Tersedianya Laporan Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah
 - b) Indikator : Jumlah laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah
56. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah

- a) Sasaran : Tersedianya Laporan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
- b) Indikator : Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah serta dokumen sosialisasi

57. Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah

- a) Sasaran : Tersedianya Laporan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
- b) Indikator : Jumlah Laporan Barang Milik Daerah

58. Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota.

- a) Sasaran : Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
- b) Indikator : Jumlah Pengurus Barang yang diberi pembinaan pengelolaan BMD

Dalam penyampaian Renja Perubahan BPKAD, kegiatan yang diajukan tentunya mengacu kepada RPJMD dan Renstra SKPD BPKAD dengan dana indikatif untuk selanjutnya di proses masuk ke dalam RKPD Perubahan dan setelah melalui proses menjadiacuan dalam penyusunan KUA/PPAS Perubahan. KUA/PPAS Perubahan inilah nantinya setelah di sepakati antara pihak DPRD dan Pemerintah Daerah menjadi dasar bagi menyusun RKA Perubahan SKPD. Adapun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang di usulkan dalam Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 BPKAD dan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 Kabupaten Tanah Laut dengan kinerja yang akan di capai adalah sebagaimana tabel berikut ini:

PENETAPAN RENCANA KERJA PERUBAHAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA PERUBAHAN OPD)

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB. TANAH LAUT TAHUN 2025

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah						332.905.977.759,00	422.261.894.908,51	350.568.692.685,77						4.820.232.946.154,00			
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						332.905.977.759,00	422.261.894.908,51	350.568.692.685,77						4.820.232.946.154,00			
	5	02				KEUANGAN						332.905.977.759,00	422.261.894.908,51	350.568.692.685,77						4.820.232.946.154,00			
1	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM Sekretariat BPKAD				88 Nilai	88 Nilai	12.189.103.281,00	11.759.339.108,00	13.197.354.831,48							12.917.885.919,00	
	5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			100 Persen	100 Persen	13.991.158,00	13.991.158,00	13.991.158,00			-	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik	Kantor BPKAD kabupaten Tanah Laut		20.659.350,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	

							Jumlah Dokume n Perenca naan Perangk at Daerah				7 Dokumen	7 Dokum en	8.993.175,00	8.993.175,00	8.879.478,30	Kab. Tanah Laut, Semu a Keca mata n, Semu a Kel/D esa	Sisa Lebih Perhit ungan Angga ran Tahun Sebel umny a	-	03. Penyeleng garaan Tata kelola Pemerinta han yang Baik				9.891.500,00	BADAN PENGELOL AAN KEUANGA N DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangk at Daerah				6 Laporan	6 Lapora n	4.997.983,00	4.997.983,00	4.984.077,50	Kab. Tanah Laut, Semu a Keca mata n, Semu a Kel/D esa	Sisa Lebih Perhit ungan Angga ran Tahun Sebel umny a	-	03. Penyeleng garaan Tata kelola Pemerinta han yang Baik				10.767.850,00	BADAN PENGELOL AAN KEUANGA N DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.02		Administ rasi Keuanga n Perangka t Daerah	Persenta se Capaian Administ rasi Keuanga n Perangk at Daerah	-			100 Persen	100 Persen	8.827.656.333,00	8.827.656.332,00	8.827.656.332,00			-	03. Penyeleng garaan Tata kelola Pemerinta han yang Baik	Kantor BPKAD kabupat en Tanah Laut			9.312.226.569,0 0	BADAN PENGELOL AAN KEUANGA N DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		

							Jumlah Orang yang Meneri ma Gaji dan Tunjang an ASN					45 Orang/bulan	45 Orang/ bulan	8.820.656.466,00	8.820.656.465,00	10.105.768.374,00	Kab. Tanah Laut, Semu a Keca mata n, Semu a Kel/D esa	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD) Sisa Lebih Perhit ungan Angga ran Tahun Sebel umny a Dana Aloka si Umu m (DAU) DAU Tamb ahan Duku ngan Penda naan atas Kebija kan Pengg ajian Pega wai Peme rintah denga n Perja njian Kerja	-	03. Penyeleng garaan Tata kelola Pemerinta han yang Baik			9.297.226.569,0 0	BADAN PENGELOL AAN KEUANGA N DAN ASET DAERAH	
	5	02	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																			

							Jumlah Dokume n Penata sahaan dan Pengujia n/Verifik asi Keuanga n SKPD				350 Dokumen	350 Dokum en	6.999.867,00	6.999.867,00	5.599.867,00	Kab. Tanah Laut, Semu a Keca mata n, Semu a Kel/D esa	Sisa Lebih Perhit ungan Angga ran Tahun Sebel umny a	-	03. Penyeleng garaan Tata kelola Pemerinta han yang Baik			15.000.000,00	BADAN PENGELOL AAN KEUANGA N DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.05		Administ rasi Kepegaw aian Perangka t Daerah	Persenta se Capaian Administ rasi Kepegaw aian Perangk at Daerah	-			100 Persen	100 Persen	47.462.500,00	47.462.500,00	47.462.500,00			-	03. Penyeleng garaan Tata kelola Pemerinta han yang Baik	Kantor BPKAD kabupat en Tanah Laut		75.000.000,00	BADAN PENGELOL AAN KEUANGA N DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																	
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengka pan				1 Paket	1 Paket	37.462.500,00	37.462.500,00	0,00	Kab. Tanah Laut, Semu a Keca mata n, Semu a Kel/D esa	Sisa Lebih Perhit ungan Angga ran Tahun Sebel umny a	-	03. Penyeleng garaan Tata kelola Pemerinta han yang Baik			50.000.000,00	BADAN PENGELOL AAN KEUANGA N DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																	
							Jumlah Orang yang Mengiku ti Bimbing an Teknis Impleme ntasi Peratura n Perunda ng-Undanga n				2 Orang	2 Orang	10.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Tanah Laut, Semu a Keca mata n, Semu a Kel/D esa	Sisa Lebih Perhit ungan Angga ran Tahun Sebel umny a	-	03. Penyeleng garaan Tata kelola Pemerinta han yang Baik			25.000.000,00	BADAN PENGELOL AAN KEUANGA N DAN ASET DAERAH

	5	02	01	2.06		Administ rasi Umum Perangka t Daerah	Persenta se Capaian Administ rasi Umum Perangk at Daerah	-			100 Persen	100 Persen	1.769.247.602,00	1.339.497.602,00	1.339.497.602,00			-	03. Penyeleng garaan Tata kelola Pemerinta han yang Baik	Kantor BPKAD kabupat en Tanah Laut		1.835.000.000,0 0	BADAN PENGELOL AAN KEUANGA N DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
							Jumlah Paket Kompon en Instalasi Listrik/P enerang an Banguna n Kantor yang Disediak an				1 Paket	1 Paket	9.984.679,00	9.984.679,00	9.984.679,00	Kab. Tanah Laut, Semu a Keca mata n, Semu a Kel/D esa	Sisa Lebih Perhit ungan Angga ran Tahun Sebel umny a	-	03. Penyeleng garaan Tata kelola Pemerinta han yang Baik			15.000.000,00	BADAN PENGELOL AAN KEUANGA N DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Paket Peralata n dan Perlengk apan Kantor yang Disediak an				8 Paket	8 Paket	130.499.274,00	130.499.274,00	112.405.496,30	Kab. Tanah Laut, Semu a Keca mata n, Semu a Kel/D esa	Sisa Lebih Perhit ungan Angga ran Tahun Sebel umny a	-	03. Penyeleng garaan Tata kelola Pemerinta han yang Baik			100.000.000,00	BADAN PENGELOL AAN KEUANGA N DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	
							Jumlah Paket Peralata n Rumah Tangga yang Disediak an				1 Paket	1 Paket	9.992.657,00	9.992.657,00	9.992.657,00	Kab. Tanah Laut, Semu a Keca mata n, Semu a Kel/D esa	Sisa Lebih Perhit ungan Angga ran Tahun Sebel umny a	-	03. Penyeleng garaan Tata kelola Pemerinta han yang Baik			10.000.000,00	BADAN PENGELOL AAN KEUANGA N DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																	

							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	49.999.792,00	49.999.792,00	39.977.935,38	Kab. Tanah Laut, Semu a Kecamatan, Semu a Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik				65.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material																		
							Jumlah Paket Bahan/ Material yang Disediakan				2 Paket	3 Paket	15.000.000,00	15.000.000,00	17.975.550,00	Kab. Tanah Laut, Semu a Kecamatan, Semu a Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik				15.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				200 Laporan	200 Laporan	1.500.000.000,00	1.070.250.000,00	955.375.000,00	Kab. Tanah Laut, Semu a Kecamatan, Semu a Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik				1.500.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	2 Dokumen	28.771.200,00	28.771.200,00	542.856.600,00	Kab. Tanah Laut, Semu a Kecamatan, Semu a Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik				100.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		

							Jumlah Dokume n Dukunga n Pelaksan aan Sistem Pemerin tahan Berbasis Elektroni k pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokum en	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Tanah Laut, Semu a Keca mata n, Semu a Kel/D esa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	03. Penyeleng garaan Tata kelola Pemerinta han yang Baik				30.000.000,00	BADAN PENGELOL AAN KEUANGA N DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.07		Pengada an Barang Milik Daerah Penunja ng Urusan Pemerint ah Daerah	Persenta se Capaian Pengada an Barang Milik Daerah Penunja ng Urusan Pemerin tah Daerah	-			100 Persen	100 Persen	546.290.072,00	546.275.900,00	546.275.900,00			-	03. Penyeleng garaan Tata kelola Pemerinta han yang Baik	Kantor BPKAD kabupat en Tanah Laut			550.000.000,00	BADAN PENGELOL AAN KEUANGA N DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
							Jumlah Unit Kendara an Dinas Operasio nal atau Lapanga n yang Disediak an				2 Unit	2 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Tanah Laut, Semu a Keca mata n, Semu a Kel/D esa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	03. Penyeleng garaan Tata kelola Pemerinta han yang Baik				50.000.000,00	BADAN PENGELOL AAN KEUANGA N DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																		
							Jumlah Paket Mebel yang Disediak an				14 Unit	14 Unit	99.936.372,00	99.922.200,00	99.922.200,00	Kab. Tanah Laut, Semu a Keca mata n, Semu a Kel/D	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	03. Penyeleng garaan Tata kelola Pemerinta han yang Baik				150.000.000,00	BADAN PENGELOL AAN KEUANGA N DAN ASET DAERAH

															esa								
	5	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				7 Unit	8 Unit	146.353.700,00	146.353.700,00	156.343.700,00	Kab. Tanah Laut, Semu a Kecamatan, Semu a Kel/D esa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik			250.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	Kab. Tanah Laut, Semu a Kecamatan, Semu a Kel/D esa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik			100.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 Persen	100 Persen	849.921.716,00	849.921.716,00	849.921.716,00			-	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik	Kantor BPKAD kabupaten Tanah Laut		950.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	

							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	350.000.000,00	350.000.000,00	270.000.000,00	Kab. Tanah Laut, Semu a Kecamatan, Semu a Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik				450.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	499.921.716,00	499.921.716,00	337.246.917,00	Kab. Tanah Laut, Semu a Kecamatan, Semu a Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik				500.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 Persen	100 Persen	134.533.900,00	134.533.900,00	134.533.900,00			-	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik	Kantor BPKAD kabupaten Tanah Laut			175.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	20.000.000,00	20.000.000,00	34.986.400,00	Kab. Tanah Laut, Semu a Kecamatan, Semu a Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik				25.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

							a dan dibayark an Pajaknya																
	5	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
							Jumlah Kendara an Dinas Operasio nal atau Lapanga n yang Dipelihar a dan dibayark an Pajak dan Perizina nnya				15 Unit	15 Unit	64.608.000,00	64.608.000,00	80.130.000,00	Kab. Tanah Laut, Semu a Keca mata n, Semu a Kel/D esa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	03. Penyeleng garaan Tata kelola Pemerinta han yang Baik			80.000.000,00	BADAN PENGELOL AAN KEUANGA N DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Peralata n dan Mesin Lainnya yang Dipelihar a				22 Unit	22 Unit	24.925.900,00	24.925.900,00	24.925.900,00	Kab. Tanah Laut, Semu a Keca mata n, Semu a Kel/D esa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	03. Penyeleng garaan Tata kelola Pemerinta han yang Baik			45.000.000,00	BADAN PENGELOL AAN KEUANGA N DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Gedung Kantor dan Banguna n Lainnya yang Dipelihar a/Direha bilitasi				1 Unit	1 Unit	25.000.000,00	25.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Tanah Laut, Semu a Keca mata n, Semu a Kel/D esa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	03. Penyeleng garaan Tata kelola Pemerinta han yang Baik			25.000.000,00	BADAN PENGELOL AAN KEUANGA N DAN ASET DAERAH

2	5	02	02			PROGRA M PENGEL OLAAN KEUANG AN DAERAH	Persenta se Penyam paian Dokume n Laporan Keuanga n Pemerin tah Daerah yang tepat waktu				100 Persen	100 Persen	312.711.451.651,00	401.691.990.322,15	325.005.619.921,66								305.147.360.23 5,00	
	5	02	02	2.01		Koordina si dan Penyusu nan Rencana Anggara n Daerah	Persenta se Capaian Koordina si dan Penyusu nan Rencana Anggara n Daerah	-			100 Persen	100 Persen	498.458.313,00	498.458.313,00	498.458.313,00			-	03. Penyeleng garaan Tata kelola Pemerinta han yang Baik	Pemerin tah Kabupat en Tanah Laut		641.031.185,00	BADAN PENGELOL AAN KEUANGA N DAN ASET DAERAH	
	5	02	02	2.01	0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS																		
							Jumlah Dokume n KUA dan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokum en	43.933.562,00	43.933.562,00	40.997.949,39	Kab. Tanah Laut, Semu a Keca mata n, Semu a Kel/D esa	Sisa Lebih Perhit ungan Angga ran Tahun Sebel umny a	-	03. Penyeleng garaan Tata kelola Pemerinta han yang Baik			60.000.000,00	BADAN PENGELOL AAN KEUANGA N DAN ASET DAERAH	
	5	02	02	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS																		
							Jumlah Dokume n Perubah an KUA dan Perubah an PPAS yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokum en	43.678.858,00	43.678.858,00	36.509.639,00	Kab. Tanah Laut, Semu a Keca mata n, Semu a Kel/D esa	Sisa Lebih Perhit ungan Angga ran Tahun Sebel umny a	-	03. Penyeleng garaan Tata kelola Pemerinta han yang Baik			60.000.000,00	BADAN PENGELOL AAN KEUANGA N DAN ASET DAERAH	
	5	02	02	2.01	0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD																		

							Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi				40 Dokumen	40 Dokum en	16.301.779,00	16.301.779,00	14.403.422,00	Kab. Tanah Laut, Semu a Keca mata n, Semu a Kel/D esa	Sisa Lebih Perhit ungan Angga ran Tahun Sebel umny a	-	03. Penyeleng garaan Tata kelola Pemerinta han yang Baik			17.000.000,00	BADAN PENGELOL AAN KEUANGA N DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD																	
							Jumlah Perubah an RKA-SKPD yang Diverifikasi				40 Dokumen	40 Dokum en	16.320.405,00	16.320.405,00	16.301.862,00	Kab. Tanah Laut, Semu a Keca mata n, Semu a Kel/D esa	Sisa Lebih Perhit ungan Angga ran Tahun Sebel umny a	-	03. Penyeleng garaan Tata kelola Pemerinta han yang Baik			17.000.000,00	BADAN PENGELOL AAN KEUANGA N DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD																	
							Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi				40 Dokumen	40 Dokum en	4.136.885,00	4.136.885,00	709.914,00	Kab. Tanah Laut, Semu a Keca mata n, Semu a Kel/D esa	Sisa Lebih Perhit ungan Angga ran Tahun Sebel umny a	-	03. Penyeleng garaan Tata kelola Pemerinta han yang Baik			5.787.830,00	BADAN PENGELOL AAN KEUANGA N DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD																	
							Jumlah Perubah an DPA-SKPD yang Diverifikasi				40 Dokumen	40 Dokum en	4.235.743,00	4.235.743,00	782.688,00	Kab. Tanah Laut, Semu a Keca mata n, Semu a Kel/D esa	Sisa Lebih Perhit ungan Angga ran Tahun Sebel umny a	-	03. Penyeleng garaan Tata kelola Pemerinta han yang Baik			5.787.830,00	BADAN PENGELOL AAN KEUANGA N DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD																	

							Jumlah Peratura n Daerah tentang APBD dan Peratura n Kepala Daerah tentang Penjabar an APBD				2 Dokumen	2 Dokum en	179.730.163,00	179.730.163,00	172.322.702,35	Kab. Tanah Laut, Semu a Keca mata n, Semu a Kel/D esa	Sisa Lebih Perhit ungan Angga ran Tahun Sebel umny a	-	03. Penyeleng garaan Tata kelola Pemerinta han yang Baik			227.878.000,00	BADAN PENGELOL AAN KEUANGA N DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD																	
							Jumlah Peratura n Daerah tentang Perubah an APBD dan Peratura n Kepala Daerah tentang Penjabar an Perubah an APBD				2 Dokumen	2 Dokum en	158.964.406,00	158.964.406,00	173.935.390,80	Kab. Tanah Laut, Semu a Keca mata n, Semu a Kel/D esa	Sisa Lebih Perhit ungan Angga ran Tahun Sebel umny a	-	03. Penyeleng garaan Tata kelola Pemerinta han yang Baik			215.401.550,00	BADAN PENGELOL AAN KEUANGA N DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran																	
							Jumlah Dokume n Regulasi serta Kebijaka n Bidang Anggara n				6 Dokumen	5 Dokum en	31.156.512,00	31.156.512,00	25.145.111,00	Kab. Tanah Laut, Semu a Keca mata n, Semu a Kel/D esa	Sisa Lebih Perhit ungan Angga ran Tahun Sebel umny a	-	03. Penyeleng garaan Tata kelola Pemerinta han yang Baik			32.175.975,00	BADAN PENGELOL AAN KEUANGA N DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.02		Koordina si dan Pengelol aan Perbend aharaan Daerah	Persenta se capaian Koordina si dan Pengelol aan Perbend aharaan Daerah	-			100 Persen	100 Persen	159.687.321,00	156.027.321,00	156.027.321,00			-	03. Penyeleng garaan Tata kelola Pemerinta han yang Baik	Pemerin tah Kabupat en Tanah Laut		243.329.050,00	BADAN PENGELOL AAN KEUANGA N DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.02	0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD																	

							Jumlah Dokume n Hasil Pengend alian dan Penerbit an Anggara n Kas dan SPD					84 Dokumen	84 Dokum en	14.797.621,00	14.797.621,00	13.670.768,80	Kab. Tanah Laut, Semu a Keca mata n, Semu a Kel/D esa	Sisa Lebih Perhit ungan Angga ran Tahun Sebel umny a	-	03. Penyeleng garaan Tata kelola Pemerinta han yang Baik				15.929.050,00	BADAN PENGELOL AAN KEUANGA N DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.02	0004	Penatausahaan Pembiayaan Daerah																			
							Jumlah Dokume n Hasil Penatau sahaan Pembiay aan Daerah					1 Dokumen	1 Dokum en	59.968.402,00	56.308.402,00	44.978.904,40	Kab. Tanah Laut, Semu a Keca mata n, Semu a Kel/D esa	Sisa Lebih Perhit ungan Angga ran Tahun Sebel umny a	-	03. Penyeleng garaan Tata kelola Pemerinta han yang Baik				75.000.000,00	BADAN PENGELOL AAN KEUANGA N DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.02	0008	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas																			
							Jumlah Dokume n Hasil Koordina si Pelaksan aan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelol aan Kas, Pelaksan aan Analisis Pembiay aan dan Penemp atan Uang Daerah sebagai Optimali					2 Dokumen	2 Dokum en	19.928.218,00	19.928.218,00	15.776.218,00	Kab. Tanah Laut, Semu a Keca mata n, Semu a Kel/D esa	Sisa Lebih Perhit ungan Angga ran Tahun Sebel umny a	-	03. Penyeleng garaan Tata kelola Pemerinta han yang Baik				38.500.000,00	BADAN PENGELOL AAN KEUANGA N DAN ASET DAERAH

							sasi Kas															
	5	02	02	2.02	0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan																
						Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan				2 Dokumen	2 Dokumen	9.999.829,00	9.999.829,00	9.999.829,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik			18.900.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.02	0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota																
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah				120 Orang	120 Orang	54.993.251,00	54.993.251,00	54.993.251,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik			95.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

							Kabupat en/Kota																
	5	02	02	2.03		Koordina si dan Pelaksan aan Akuntan si dan Pelapora n Keuanga n Daerah	Persenta se Capaian Koordina si dan Pelaksan aan Akuntan si dan Pelapora n Keuanga n Daerah	-			100 Persen	100 Persen	799.995.386,00	985.150.644,20	985.150.644,20			-	03. Penyeleng garaan Tata kelola Pemerinta han yang Baik	Pemerin tah Kabupat en Tanah Laut		1.263.000.000,0 0	BADAN PENGELOL AAN KEUANGA N DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.03	0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah																	
						Jumlah Laporan Hasil Koordina si Pelaksan aan Akuntan si Penerim aan dan Pengelu aran Kas Daerah				7 Laporan	7 Lapora n	119.997.321,00	119.997.161,94	101.268.220,71	Kab. Tanah Laut, Semu a Keca mata n, Semu a Kel/D esa	Sisa Lebih Perhit ungan Angga ran Tahun Sebel umny a	-	03. Penyeleng garaan Tata kelola Pemerinta han yang Baik			168.000.000,00	BADAN PENGELOL AAN KEUANGA N DAN ASET DAERAH	
	5	02	02	2.03	0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban																	
						Jumlah Dokume n Hasil Rekonsili asi dan Verifikas i Aset, Kewajiba n, Ekuitas, Pendapa tan, Belanja,				4 Dokumen	4 Dokum en	89.999.657,00	85.424.235,73	83.714.620,00	Kab. Tanah Laut, Semu a Keca mata n, Semu a Kel/D esa	Sisa Lebih Perhit ungan Angga ran Tahun Sebel umny a	-	03. Penyeleng garaan Tata kelola Pemerinta han yang Baik			168.000.000,00	BADAN PENGELOL AAN KEUANGA N DAN ASET DAERAH	

							Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban																
	5	02	02	2.03	0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran																	
							Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran				8 Laporan	8 Laporan	199.999.691,00	192.679.691,00	172.007.545,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik			231.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.03	0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah																	
							Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi				6 Laporan	6 Laporan	94.999.606,00	294.798.856,28	280.907.168,60	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik			250.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.03	0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota																	

							Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota					6 Dokumen	6 Dokumen	189.999.606,00	189.999.606,00	178.482.720,00	Kab. Tanah Laut, Semu a Kecamatan, Semu a Kel/D esa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik				235.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.03	0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah																			
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah					12 Dokumen	12 Dokumen	34.999.782,00	34.996.370,25	28.383.303,22	Kab. Tanah Laut, Semu a Kecamatan, Semu a Kel/D esa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik				116.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.03	0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota																			

							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintahan Kabupaten/Kota				120 Orang	120 Orang	69.999.723,00	67.254.723,00	52.649.444,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik			95.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase capaian Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-			100 Persen	100 Persen	311.253.310.631,00	400.052.354.043,95	400.052.354.043,95			-	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik	Pemerintah Kabupaten Tanah Laut		303.000.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.04	0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan																	
							Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				130 Laporan	130 Laporan	286.253.310.631,00	290.376.263.769,00	299.854.392.561,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Desa	-	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik			278.000.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.04	0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak																	

							Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				1 Laporan	1 Lapora n	25.000.000.000,00	109.676.090.274,95	23.633.286.689,39	Kab. Tanah Laut, Semua Kcamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik			25.000.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
3	5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Barang Milik Daerah yang dimanfaatkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku				100 Persen	100 Persen	8.005.422.827,00	8.810.565.478,36	12.365.717.932,63							4.502.167.700.000,00	
	5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Capaian Pengelolaan Barang Milik Daerah	-			100 Persen	100 Persen	8.005.422.827,00	8.810.565.478,36	8.810.565.478,36			-	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik	Pemerintah Kabupaten Tanah Laut		4.502.167.700.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0001	Penyusunan Standar Harga																	
							Jumlah Standar Harga yang Disusun				1 Dokumen	2 Dokumen	79.998.464,00	229.995.307,90	210.164.486,90	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik			84.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0002	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah																	

							Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah				41 Dokumen	41 Dokum en	4.999.983.626,00	5.506.883.190,13	5.209.668.863,78	Kab. Tanah Laut, Semu a Keca mata n, Semu a Kel/D esa	Sisa Lebih Perhit ungan Angga ran Tahun Sebel umny a	-	03. Penyeleng garaan Tata kelola Pemerinta han yang Baik			4.500.000.000.0 00,00	BADAN PENGELOL AAN KEUANGA N DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah																	
							Jumlah Kebijaka n Pengelol aan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	1 Dokum en	44.999.462,00	44.999.462,00	31.919.222,00	Kab. Tanah Laut, Semu a Keca mata n, Semu a Kel/D esa	Sisa Lebih Perhit ungan Angga ran Tahun Sebel umny a	-	03. Penyeleng garaan Tata kelola Pemerinta han yang Baik			50.000.000,00	BADAN PENGELOL AAN KEUANGA N DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah																	
							Jumlah Laporan Penatau sahan Barang Milik Daerah				16 Laporan	16 Lapora n	349.999.614,00	614.999.051,74	629.226.298,60	Kab. Tanah Laut, Semu a Keca mata n, Semu a Kel/D esa	Sisa Lebih Perhit ungan Angga ran Tahun Sebel umny a	-	03. Penyeleng garaan Tata kelola Pemerinta han yang Baik			367.000.000,00	BADAN PENGELOL AAN KEUANGA N DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah																	
							Jumlah Laporan Hasil Inventari sasi (LHI) Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Lapora n	79.999.649,00	52.589.600,10	25.939.680,10	Kab. Tanah Laut, Semu a Keca mata n, Semu a Kel/D esa	Sisa Lebih Perhit ungan Angga ran Tahun Sebel umny a	-	03. Penyeleng garaan Tata kelola Pemerinta han yang Baik			98.000.000,00	BADAN PENGELOL AAN KEUANGA N DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0007	Pengamanan Barang Milik Daerah																	

							Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah				3 Laporan	3 Lapora n	941.312.125,00	902.110.024,22	781.886.777,02	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Bagi Hasil (DBH)	-	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik			760.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0008	Penilaian Barang Milik Daerah																	
							Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah				5 Laporan	5 Lapora n	222.131.376,00	198.790.991,24	154.782.746,30	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik			197.800.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah																	
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah				2 Laporan	3 Lapora n	1.108.999.335,00	1.090.699.335,00	5.112.434.550,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Bagi Hasil (DBH)	-	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik			325.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah																	

							Jumlah Dokume n Hasil Optimali sasi Penggun aan, Pemanfa atan, Peminda htangan an, Pemusn ahan, dan Penghap usan Barang Milik Daerah				8 Dokumen	8 Dokum en	89.999.858,00	81.499.595,74	70.852.959,77	Kab. Tanah Laut, Semu a Keca mata n, Semu a Kel/D esa	Sisa Lebih Perhit ungan Angga ran Tahun Sebel umny a	-	03. Penyeleng garaan Tata kelola Pemerinta han yang Baik				150.000.000,00	BADAN PENGELOL AAN KEUANGA N DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah																		
							Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun				8 Laporan	8 Lapora n	24.999.651,00	24.999.651,00	20.089.374,00	Kab. Tanah Laut, Semu a Keca mata n, Semu a Kel/D esa	Sisa Lebih Perhit ungan Angga ran Tahun Sebel umny a	-	03. Penyeleng garaan Tata kelola Pemerinta han yang Baik				50.900.000,00	BADAN PENGELOL AAN KEUANGA N DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota																		
							Jumlah Orang yang Mengiku ti Pembina an Pengelol aan Barang Milik Daerah Pemerin tah Kabupat en/Kota				80 Orang	80 Orang	62.999.667,00	62.999.269,29	118.752.974,16	Kab. Tanah Laut, Semu a Keca mata n, Semu a Kel/D esa	Sisa Lebih Perhit ungan Angga ran Tahun Sebel umny a	-	03. Penyeleng garaan Tata kelola Pemerinta han yang Baik				85.000.000,00	BADAN PENGELOL AAN KEUANGA N DAN ASET DAERAH
	J U M L A H												332.905.977.759,00	422.261.894.908,51	350.568.692.685,77							4.820.232.946.154,00		

Dalam tabel di atas untuk RENJA Perubahan SKPD BPKAD Tahun 2025 terdapat 3 Program dan 12 kegiatan dan 58 Sub Kegiatan dengan total usulan anggaran kegiatan SKPD sebelum perubahan sebesar Rp. 332.905.977.759,00,- , setelah perubahan anggaran menjadi Rp 350.568.692.685,77,- bertambah sebesar Rp 17.662.714.926,77,- dengan indikator kinerja kegiatan dan sub kegiatan masing-masing.

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan (RENJA Perubahan SKPD) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut 2025 – 2029 dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Tanah Laut serta target dan sasaran pembangunan yang dioperasionalkan melalui RKPD Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025.

RENJA Perubahan SKPD BPKAD adalah sebuah perencanaan pembangunan tahunan, sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2025.

RENJA Perubahan SKPD BPKAD Kabupaten Tanah Laut tahun 2025 dibuat dalam rangka mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi terkait dengan isu-isu penting berkaitan dengan tugas fungsi BPKAD menyangkut pengelolaan keuangan dan pengelolaan kekayaan daerah.

Dengan adanya RENJA Perubahan SKPD BPKAD Kabupaten Tanah Laut, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari Visi dan Misi Instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut maupun dengan SKPD yang membidangi fungsi lain.

Pelaihari, 10 Juni 2025

Kepala BPKAD Kab. Tanah Laut,



MUHAMMAD DARMIN, S.IP, M.Si

(Pembina Utama Muda / IV.c)

NIP. 19661227 198703 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jl.A.Syairani Pelaihari Phone. (0512) 2425788
PELAIHARI

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KEPUTUSAN KEPALA BPKAD

NOMOR : 050.13 / 6 / BPKAD /2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA TAHUN 2025
 PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN
 TANAH LAUT**

KEPALA BPKAD,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja (Renja) SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025;

b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan dimaksud huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong, dengan mengubah Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6398);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6537);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan RPJPD, RPJMD, Rencana Strategis SKPD, RKPD, Rencana Kerja SKPD dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 No 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10);

15. Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 11);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
18. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 87 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023;
20. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 39 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut sebagaimana pada diktum KESATU melaksanakan mekanisme penyusunan Rencana Kerja SKPD Tahun 2024 sebagai berikut :
1. Mengacu pada kebijakan dan sasaran pembangunan yang tercantum dalam RPJPD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2005-2025.
 2. Mengacu pada Visi, Misi, Agenda, Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan, Indikator Capaian, dan program prioritas dalam RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026.
 3. Mengacu pada Renstra SKPD dan prioritas hasil Musrenbang RKPD di Kecamatan.
 4. Mempedomani Prioritas Pembangunan Tahunan Nasional
 5. Menyelaraskan prioritas, sasaran, rencana program dan kegiatan tahunan daerah dalam mewujudkan pertumbuhan yang berkelanjutan dan berkeadilan (sustainable growth with equity) dengan strategi pembangunan nasional yang meliputi, Pro Poor, Pro Job, Pro Growth, dan Pro Environment.

6. Menyelaraskan prioritas, sasaran, rencana program dan kegiatan tahunan daerah dengan struktur dan pola pemanfaatan ruang dan/atau indikasi rencana program dalam RTRW Kabupaten Tanah Laut.
7. Mendukung dan mensinergikan pencapaian sasaran program dan kegiatan pembangunan daerah Tahun 2024 dengan program, tindakan, keluaran, target penyelesaian dan sasaran program pro rakyat, program pro keadilan, dan program tujuan pembangunan millennium (Millennium Development Goal's) sesuai dengan focus masing-masing program berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 sebagaimana diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut.
- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 2 Januari 2024

KEPALA BPKAD,



MUHAMMAD DARMIN, S.IP,M.Si

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BPKAD
KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR : 050.13/6/BPKAD/2024
TANGGAL : 2 Januari 2024

**SUSUNAN TIM PENYUSUNAN
RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025 DI LINGKUNGAN BPKAD
KABUPATEN TANAH LAUT**

No	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1	Kepala BPKAD Kabupaten Tanah Laut	Pembina
2	Sekretaris BPKAD	Pengarah
3	Kasubbag Perencanaan	Koordinator SKPD
4	Kepala Bidang Akuntansi	Koordinator Bidang
5	Kepala Bidang Belanja dan Pembiayaan	Koordinator Bidang
6	Kepala Bidang Penatausahaan Aset	Koordinator Bidang
7	Kepala Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Aset	Koordinator Bidang
8	Kasubbid Pendapatan & Pengelolaan Kas	Anggota
9	Kasubbid Akuntansi Belanja dan Beban	Anggota
10	Kasubbid Perencanaan Kebutuhan	Anggota
11	Kasubbid Inventarisasi	Anggota
12	Kasubbid Pemanfaatan & Pemindahtanganan	Anggota
13	Kasubbid Pengamanan & Pemeliharaan	Anggota
14	Kasubbid Perbendaharaan & Pembiayaan	Anggota
15	Kasubbid Anggaran	Anggota
16	Kasubbag Keuangan	Anggota
17	Kasubbag Umum Dan Kepegawaian	Anggota

KEPALA BPKAD,



MUHAMMAD DARMIN, S.IP,M.Si